



LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Bapak Gubernur kepada kami selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LKjIP ini memuat pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dokumen LKjIP diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja maupun untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial ke depannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini. Kami berharap semoga LKjIP ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial

f **Provinsi Sumatera Barat**

Drs. SYAIFULLAH, MM

NIP. 19680905 199702 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Bagan.....	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Organisasi	1
a. Dasar Pembentukan Organisasi.....	2
b. Tugas dan Fungsi	4
c. Struktur Organisasi	9
d. Sumber Daya Manusia	11
1.2. Aspek Strategis Organisasi	16
1.3. Permasalahan Utama yang sedang Dihadapi Organisasi	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Tujuan dan Sasaran OPD	22
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	27
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.4. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
Lampiran I Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2025.....	
Lampiran II LHE AKIP Dinsos Tahun 2025.....	
Lampiran III Hasil Penilaian Kemandirian PPKS per UPTD Tahun 2025.....	
Lampiran IV Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	
Lampiran V Indeks Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2021-2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 2.2	Data ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan Fungsional	13
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 3.2	Data PPKS Mandiri per UPTD Tahun 2025.....	31
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian PPKS Tahun 2025	35
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kemandirian PPKS Tahun 2025 dengan Tahun Terakhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	37
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan ke- 2 pada Tahun 2025	42
Tabel 3.6	Komponen-Komponen Penilaian Kinerja dan Pembobotannya	43
Tabel 3.7	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	45
Tabel 3.8	Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja	46
Tabel 3.9	Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2021-2025	47
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja	48
Tabel 3.11	Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan untuk pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025	53
Tabel 3.12	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	54
Tabel 3.13	Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan	55
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025	56
Tabel 3.15	Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dan Perbandingannya dengan Target Renstra Tahun 2026.....	58
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja dengan Kementerian Sosial dan Beberapa Instansi Dinas Sosial Provinsi di Tingkat Pusat dan Regional Tahun 2024	62
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2025.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jenis Jabatan	12
Gambar 3.1	Piagam Penghargaan yang Diterima Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Realisasi per Indikator Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2025	28
Grafik 3.2	Realisasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2023 s.d Tahun 2025	47
Grafik 3.3	Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2023 s.d Tahun 2025	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	10
Bagan 2	Peta Jabatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	15

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan instansi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah terkait pelaksanaan implementasi berbagai program, kegiatan dan kebijakannya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan telah berhasil dicapai. Sasaran pembangunan yang diampu oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 ditentukan melalui capaian tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase PPKS yang mandiri, nilai akuntabilitas kinerja OPD, dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial dengan mengacu kepada Visi Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”, maka Dinas Sosial melaksanakan misi ke-1 yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”. Adapun capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	a. Persentase PPKS yang mandiri	65	74,03	113,89
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	b. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,25)	BB (73,08)	99,77
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	c. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85,05	86,25	101,41
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					105,02

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

Tingkat capaian kinerja dari ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja dari ketiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 105,02 %, dan ditinjau pula dari sisi realisasi anggaran tahun 2025 yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut terealisasi sebesar 88,15 %. Hal ini mencerminkan terlaksananya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan baik.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari periode RPJMD Tahun 2021-2026 ke periode RPJMD Tahun 2025-2029, maka terhadap indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2025 tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya pada periode rencana strategis 2025-2029, Dinas Sosial menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos). Ikesos ini merupakan suatu indeks yang baru dan telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk mengukur taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara nasional, pada suatu provinsi maupun di kabupaten/kota, dimana data dasar yang digunakan adalah tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian, ada pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 juga merupakan media untuk melihat capaian kinerja pada tahun 2025 dan alat kendali serta alat pengukuran kinerja secara kuantitatif. Sebagai wujud pertanggungjawaban OPD atas pencapaian sasaran strategis yang transparan dan akuntabel dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta memerlukan dukungan dan peran aktif lembaga pemerintah pusat maupun daerah serta partisipasi masyarakat.

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah urusan sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di bidang urusan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dibantu oleh sekretariat, 4 (empat) bidang dan 8 (delapan) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Terdapat pula fungsional tertentu di lingkungan organisasi dinas sosial, diantaranya penyuluh sosial dan pekerja sosial.

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Beberapa dasar hukum atau aturan yang melandasi dari pembentukan organisasi, penyusunan laporan kinerja ini maupun pelaksanaan tugas-tugas urusan sosial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Sosial

Tugas Pokok:

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial serta pembantuan.

Fungsi Dinas Sosial:

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- b. penyelenggaran pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- c. penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi Sekretariat:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok:

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;

- c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;
- d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- e. penyiapan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok:

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Fungsi Sub Bagian Keuangan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Pokok:

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga.

Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bantuan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan bantuan dan jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;
- g. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
- h. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas Pokok:

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi sosial;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan rehabilitasi sosial;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial;
- e. penyelenggaraan koordinasi rehabilitasi sosial;
- f. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial;
- g. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas Pokok:

Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi sosial, perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil, penyuluhan sosial dan pengelolaan dana sosial dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pemberdayaan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pemberdayaan sosial;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan sosial;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan sosial;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan sosial;
- e. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan sosial;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan sosial;
- g. penyelenggaraan laporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial;
- h. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok:

Bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penanganan fakir miskin perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir dan kepulauan.

Fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang penanganan fakir miskin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program bidang penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin;

- c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pengelolaan data bidang penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan fasilitasi usaha bidang penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi bidang penanganan fakir miskin;
- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan;
- c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Bidang rehabilitasi sosial;
- e. Bidang pemberdayaan sosial;
- f. Bidang penanganan fakir miskin;
- g. UPTD, dan;
- h. Kelompok jabatan fungsional

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggambarkan jaringan kerja antar bagian-bagian dengan struktur organisasi sebagaimana dapat dilihat pada bagan 1. Adapun UPTD yang disebutkan pula pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

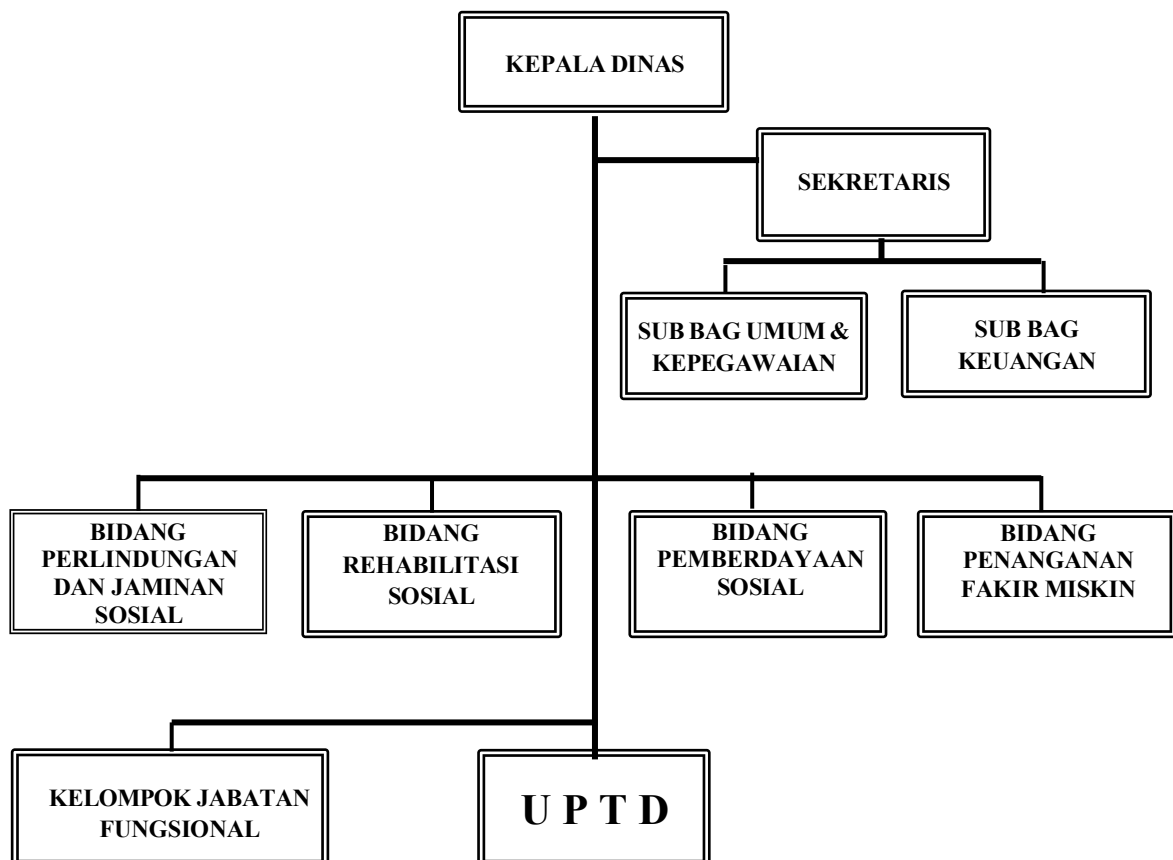
Pembentukan UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara khusus diatur pula dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 8 (delapan) UPTD di jajaran dinas sosial, yaitu :

1. UPTD Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato di Kota Padang;
2. UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu di Kota Padang;
3. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama di Lubuk Alung,

Kabupaten Padang Pariaman;

4. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni di Kota Padang Panjang;
5. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan di Kota Padang Panjang;
6. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nana Aluih di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman;
7. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar; dan
8. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Kabupaten Solok.

Bagan 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

d. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil sebanyak 151 orang (kondisi bulan Desember tahun 2025) terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbag/Kasi, Fungsional dan Staf (ASN dan Non ASN). Semua jabatan struktural di lingkungan dinas sosial beserta UPTD-UPTD berjumlah 40 orang, selanjutnya berdasarkan pangkat/golongan dan jenis kelaminnya, maka distribusi ASN seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

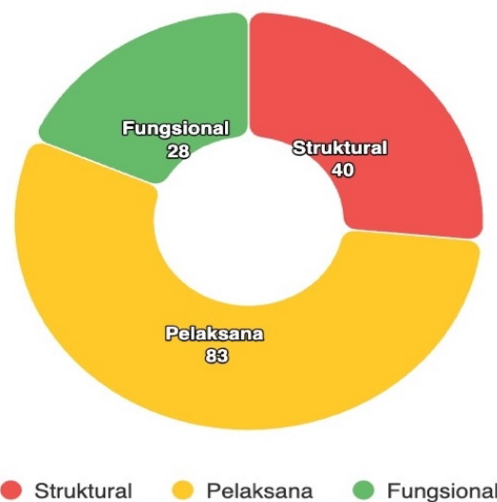
No.	Gol. /ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Golongan IV/e	-	-	-
	Golongan IV/d	-	-	-
	Golongan IV/c	1	0	1
	Golongan IV/b	4	2	6
	Golongan IV/a	9	6	15
Jumlah Gol IV		14	8	22
2	Golongan III/d	14	19	33
	Golongan III/c	4	5	9
	Golongan III/b	10	11	21
	Golongan III/a	15	20	35
Jumlah Gol III		43	55	98
3	Golongan II/d	8	3	11
	Golongan II/c	5	2	7
	Golongan II/b	5	4	9
	Golongan II/a	3	0	3
Jumlah Gol II		21	9	30
4	Golongan I/d	-	1	1
	Golongan I/c	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-
	Golongan I/a	-	-	-
Jumlah Gol I		-	1	1
Total PNS		78	73	151

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pada tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 151 orang ASN Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdiri dari laki-laki 73 orang dan perempuan 78 orang. Ini menunjukkan banyaknya jumlah ASN berjenis kelamin perempuan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) ASN pada Dinas Sosial berdasarkan jenis jabatannya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Data ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jenis Jabatan



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pada gambar 1.1 di atas terlihat pula sebaran ASN Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis jabatannya yaitu 40 orang adalah pejabat struktural, mulai dari kepala dinas, sekretaris, kabid, kepala UPTD, kepala sub bagian, kepala tata usaha, dan kepala seksi yang tersebar di dinas dan UPTD-UPTD. Sebanyak 28 orang adalah pejabat fungsional dan sisanya 83 orang adalah pelaksana. Adapun rincian pejabat fungsional yang ada saat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2**Data ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan Fungsional**

No	Nama Jabatan Fungsional	Fungsional Terampil				Fungsional Ahli				Jumlah ASN
		Pelaksana Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1	Pekerja Sosial	0	0	1	0	10	4	1	0	16
2	Penyuluh Sosial	0	0	0	0	9	2	0	0	11
3	Perawat	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

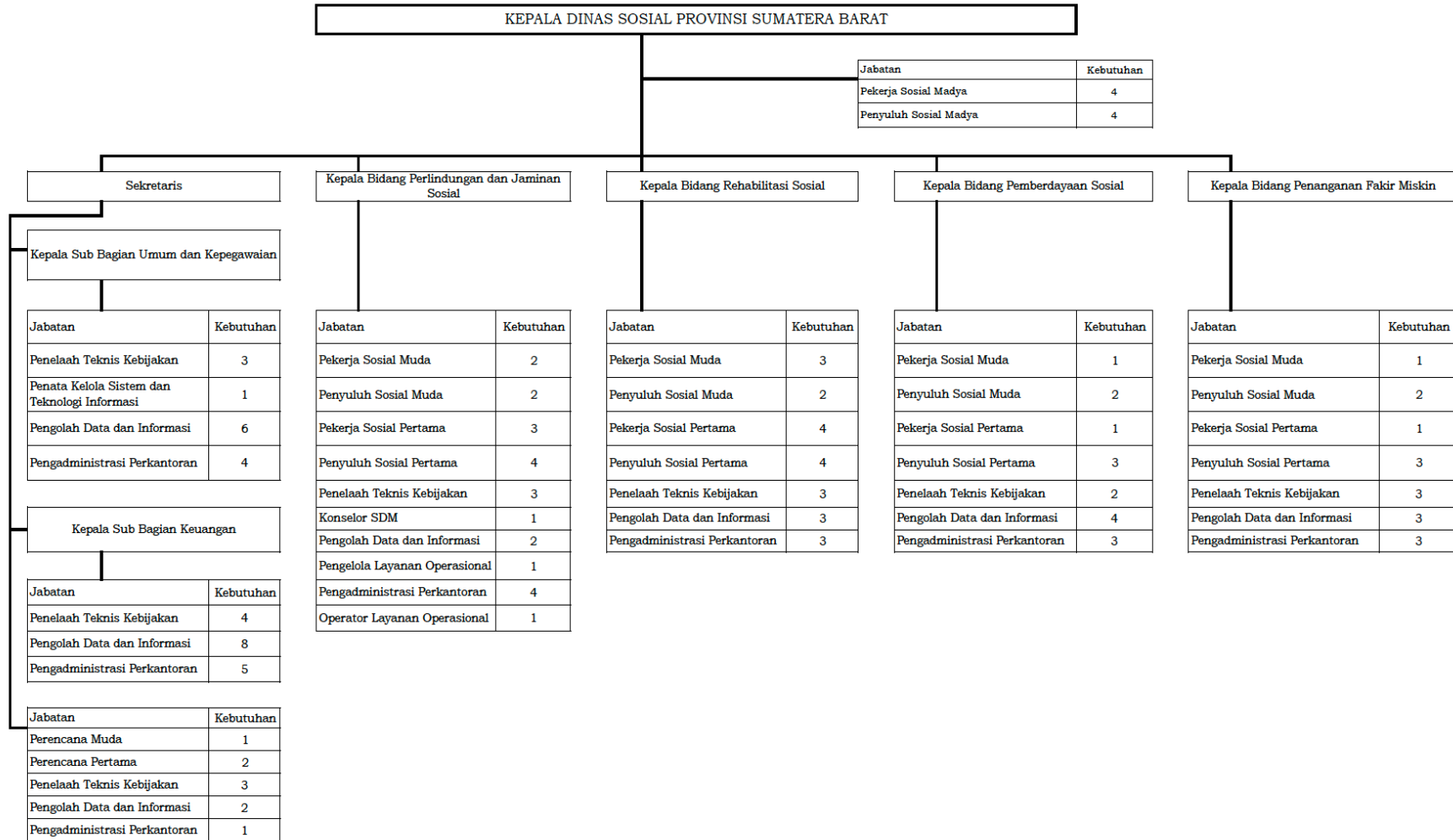
Pada tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa ASN Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jabatan fungsionalnya berjumlah 28 orang terdiri dari fungsional pekerja sosial sebanyak 16 orang, fungsional penyuluh sosial sebanyak 11 orang, dan perawat sebanyak 1 (satu) orang. Fungsional pekerja sosial sangat dibutuhkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) karena peran mereka vital dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Pekerja sosial membantu dalam rehabilitasi, pendampingan, dan reintegrasi penerima manfaat misalnya anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis, dan korban bencana alam. Secara umum, kehadiran pekerja sosial fungsional di UPTD memastikan bahwa pelayanan sosial dilakukan secara profesional, terstruktur, dan berbasis data, sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial.

Dilihat dari kebutuhan total organisasi, masih banyak jenis jabatan fungsional yang belum terisi berdasarkan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-530-2025 tanggal 27 Agustus 2025. Kemudian dapat pula dilihat bahwa hanya fungsional penyuluh sosial dan fungsional pekerja sosial yang terisi dari sejumlah jenis fungsional pada lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Masih sangat banyak jabatan fungsional lain yang belum ada SDM ASN nya hingga saat ini, seperti fungsional perencana, pengadministrasi perkantoran, penelaah teknis kebijakan, pengolah data dan informasi, dan lain-lain. Disisi lain, jumlah fungsional penyuluh sosial dan fungsional pekerja sosial tersebut masih sangat kurang dengan SDM fungsional eksisting saat ini. Contoh dalam peta jabatan tersebut dibutuhkan

sebanyak 4 (empat) orang fungsional penyuluh sosial tingkat Madya, namun sampai saat ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat belum memiliki 1 (satu) orang pun penyuluh sosial tingkat madya dimaksud. Demikian pula untuk fungsional pekerja sosial tingkat madya, baru ada 1 (satu) orang fungsional pekerja sosial tingkat madya dari 4 (empat) formasi yang tersedia. Peta jabatan terbaru pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan 2 berikut ini.

Bagan 2

Peta Jabatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-530-2025 tanggal 27 Agustus 2025

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk urusan sosial, dimana urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Sumatera Barat, dinas sosial memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah sosial di Provinsi Sumatera Barat yang semakin kompleks melalui pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal. Sasaran strategis dinas sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Meningkatnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kamauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan

dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

4. Jaminan sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang Sedang Dihadapi Organisasi

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merilis bahwa tingkat kemiskinan per Maret 2025 sebesar 5,35 %. Sedangkan pada periode yang sama pada bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan penduduk yang diukur dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 5,97 %. Keadaan ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin pada awal tahun 2025 kemaren.

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

1.3.2 Kebencanaan

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana sangat tinggi. Posisi geografis yang berada di pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia menjadikan wilayah ini rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, kondisi topografi yang didominasi perbukitan dan pegunungan dengan curah hujan tinggi membuat wilayah ini rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Situasi ini diperparah dengan adanya perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem, kenaikan suhu, ketidakpastian musim, dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi.

Tingginya intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim bukan sekadar persoalan kebencanaan, tetapi juga menjadi isu strategis pembangunan daerah. Bencana berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang besar, sehingga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, isu ini harus dikelola secara serius dengan menempatkan aspek mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.

Dalam dua tahun terakhir (tahun 2024 dan 2025), Sumatera Barat telah mengalami berbagai bencana dengan intensitas tinggi, seperti banjir dan tanah longsor dengan korban meninggal dunia yang mencapai ratusan orang pada setiap tahun tersebut. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori rawan bencana menengah hingga tinggi. Kejadian bencana yang berulang tidak hanya merusak infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengganggu akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Tingginya intensitas bencana dan perubahan iklim menimbulkan dampak yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan yakni adanya korban jiwa, kerugian harta benda, perpindahan penduduk (pengungsi), serta terganggunya akses pendidikan dan kesehatan.

1.3.3 Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu

juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Permasalahan utama anak terlantar yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hak anak menurut peraturan-peraturan tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, pendidikan, kesehatan, identitas (nama dan kewarganegaraan), perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta hak untuk bermain, berpartisipasi, dan berekreasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi keterlantaran terhadap anak tersebut akan berakibat hak-haknya tersebut tidak terpenuhi.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Seiring dengan itu, maka jumlah lanjut usia terlantar juga akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar tersebut agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

1.3.4 Kedisabilitas

Kedisabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

1.3.5 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dunia usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan serta pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari dunia usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

1.3.6 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial tersebut, maka PPKS dan PSKS merupakan kunci dalam melaksanakan perencanaan dan intervensi program, kegiatan serta anggaran yang akan dialokasikan.

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Barat saat ini cenderung mengalami peningkatan (sesuai data dari Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota). Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, kejadian bencana alam, serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penanganan PPKS, baik

PPKS pada UPTD-UPTD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun panti-panti swasta milik masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Permasalahan utama PPKS tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perhatian dalam penanganan serta langkah-langkah strategis dan kolaboratif dalam penanganan PPKS di Provinsi Sumatera Barat.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah individu, keluarga, kelompok, dan lembaga yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi sumber daya manusia (seperti pekerja sosial profesional, Pekerja Sosial Masyarakat/PSM, Taruna Siaga Bencana/Tagana, karang taruna, penyuluh sosial), sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan, yang semuanya bersinergi membantu penanganan PPKS.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran OPD

a. Tujuan dan Sasaran OPD sesuai dengan Rencana Strategis yang sudah disusun

1. Tujuan

Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021–2026 ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Meningkatnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
- 2) Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

2. Sasaran

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ada 3 (tiga) sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator kinerja “persentase PPKS yang mandiri”.
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja “nilai akuntabilitas kinerja OPD”.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja “tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi”.

b. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran OPD dengan Misi, Tujuan dan Sasaran KDH

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan

Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) misi, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung memiliki keterkaitan tujuan dan sasaran OPD dengan misi, tujuan dan sasaran kepala daerah pada misi ke-1 yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan prioritas pembangunan pada pengurangan kemiskinan, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam panti, pemberian hibah permakanan bagi panti-panti milik masyarakat, serta penanganan korban bencana alam pada masa tanggap darurat karena Wilayah Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi maupun tsunami.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas pada tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 6 program utama, yaitu:

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Program perlindungan dan jaminan sosial
4. Program penanganan bencana
5. Program pengelolaan taman makam pahlawan
6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

2.2. Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk mengukur dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan indikator perjanjian kinerja tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja dan didalamnya terdapat sasaran, indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati diharapkan berada pada level kinerja *outcome* dan memiliki kesinambungan kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima tugas.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada tahun 2025 ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama satu tahun tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	a. Persentase PPKS yang mandiri	65 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	b. Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (73,25)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	c. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	B (85,05)

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.920.428.743,-
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.112.330.650,-
3	Program Rehabilitasi Sosial	55.350.245.441,-
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	372.258.315,-
5	Program Penanganan Bencana	269.597.166,-
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	67.542.755,-

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berfungsi sebagai alat ukur yang penting untuk mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai dalam sistem ini menjadi media evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan kinerja. Pengukuran capaian kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- a. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

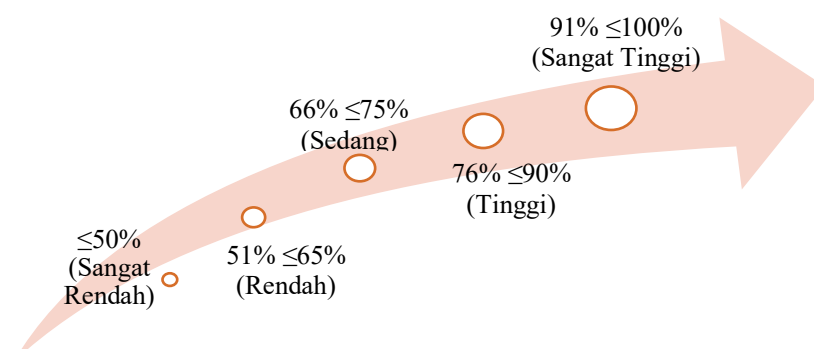
- b. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil, disusun suatu perjanjian kinerja kepala organisasi perangkat daerah pada setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak pertama dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja tahun 2025 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

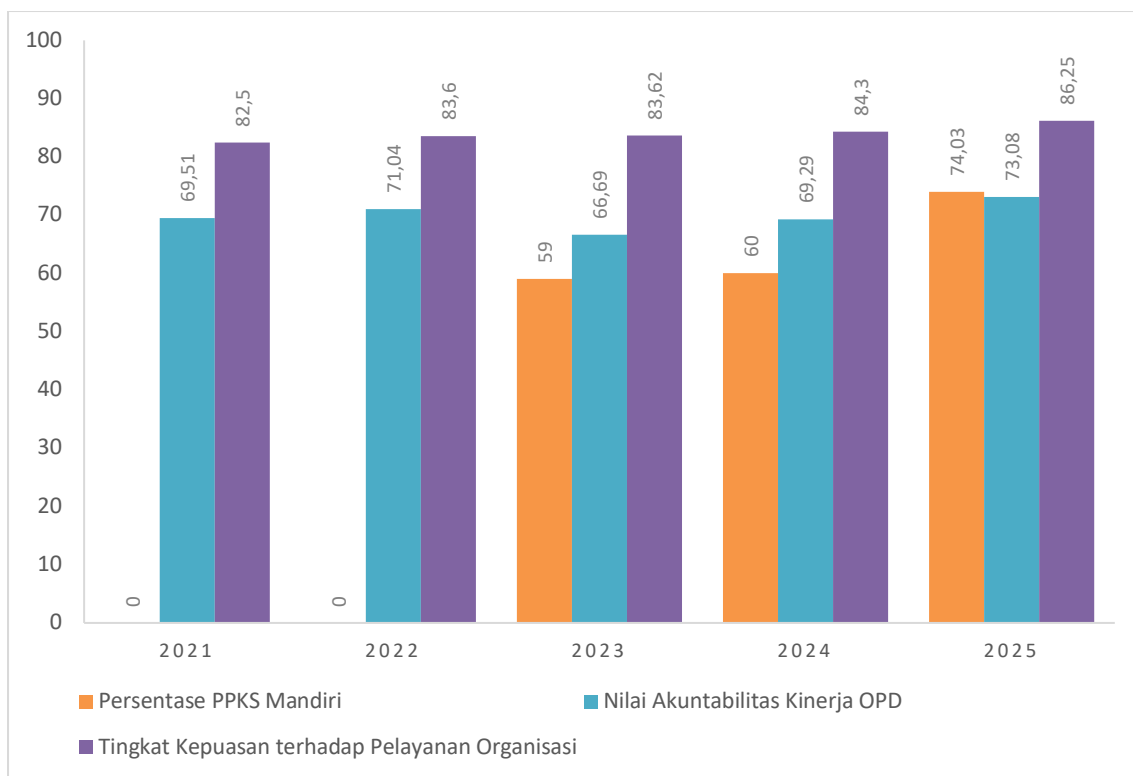
No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	65 %	74,03 %	113,89
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,25)	BB (73,08)	99,77
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (85,05)	B (86,25)	101,41
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					105,02

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran strategis tercapai. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 105,02 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh dinas sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 telah dilakukan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil realisasi atau capaian kinerja tahun 2021-2025 sesuai dengan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Capaian setiap tahunnya dari ketiga indikator sasaran selalu meningkat dan ada juga yang berfluktuatif (pada indikator nilai AKIP), sebagaimana terlihat pada grafik 3.1 dibawah ini.

Grafik 3.1
Realisasi per Indikator Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2025



Sumber: Data Capaian Kinerja Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat tahun 2021-2025 (Diolah)

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, ada 2 (dua) tujuan yang diampu oleh Dinas Sosial yaitu meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikatornya persentase PPKS yang mandiri dan tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani. Selanjutnya dua tujuan yang akan dicapai selama periode lima tahun tersebut dijabarkan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu 1) meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator sasaran persentase PPKS yang mandiri, 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja OPD, 3) meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator sasaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

Untuk melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Tujuan 1: Meningkatkan Kemandirian PPKS

Ketercapaian target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri. Berikut analisis capaian sasaran kinerja meningkatnya kemandirian PPKS pada tahun 2025.

A. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kemandirian PPKS

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial. Adapun pelayanan yang diberikan kepada PPKS di dalam panti adalah berupa:

1. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
2. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti.
4. Rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti.

Pelaksanaan pelayanan dasar bagi PPKS di dalam panti yang juga merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka setiap PPKS mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pengasuhan untuk anak terlantar, dan pemulasaraan. Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada kelayan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan PPKS yang mandiri. Dasar penetapan target indikator kinerja sasaran kemandirian PPKS ini diukur dengan persentase PPKS yang mandiri pada tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 maupun pada Rencana Kerja Tahunan 2025 dengan target yang ingin dicapai sebesar 65%.

Penghitungan dan data dukung dari realisasi kinerja tersebut pada tahun 2025 ini sama dengan model penghitungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 yang lalu. PPKS dapat dikategorikan mandiri jika keadaan PPKS tersebut dapat mandiri secara pengetahuan, sikap dan keterampilan. PPKS yang diukur adalah PPKS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada panti pelayanan rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah yang berada dibawah pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Panti pemerintah daerah yang berada dalam lingkup Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berjumlah 8 (delapan) UPTD, sebagaimana telah disebutkan pada Bab I laporan kinerja ini.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator kinerja sasaran “persentase PPKS yang mandiri” pada tahun 2025 ini yang terealisasi berdasarkan jumlah PPKS yang dilayani per Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Data PPKS Mandiri per UPTD Tahun 2025

No	PPKS	Jumlah PPKS dlm Panti (org)	Jumlah PPKS Mandiri (org)	Keterangan Kemandirian
1.	Penyandang Disabilitas Netra pada Panti Sosial Pemerintah (UPTD) PSBN Tuah Sakato Padang	44	38	<p>Pengetahuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ membaca dan menulis braille. ✓ memahami dasar-dasar anatomi dan patologi massage. ✓ memahami Orientasi dan Mobilitas. <p>Sikap, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. ✓ memiliki sikap saling menghargai dan rasa kepedulian dengan sesama. <p>Keterampilan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ menguasai keterampilan massage/shiatsu dan kerajinan tangan. ✓ mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari.
2.	Penyandang disabilitas grahita pada UPTD PSBG Harapan Ibu Padang	100	47	<p>Pengetahuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ bisa mengenal uang dan menggunakannya dengan benar. ✓ bisa mengenal angka dan huruf. ✓ bisa membaca dan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. <p>Sikap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kemampuan untuk mengucapkan terimakasih dan menyapa orang lain. ✓ bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat. ✓ bisa mengikuti kegiatan ibadah.

No	PPKS	Jumlah PPKS dlm Panti (org)	Jumlah PPKS Mandiri (org)	Keterangan Kemandirian
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ timbul rasa kepedulian sesama. <p>Keterampilan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mampu melakukan kebersihan diri sendiri dan lingkungan. ✓ menguasai keterampilan pencucian motor, membuat keset perca kaos, dan batako. ✓ bisa mengurus diri sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya ✓ bisa menulis dan meniru.
3.	Tuna sosial pada UPTD PSKW Andam Dewi Solok	50	44	<p>Pengetahuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rajin melaksanakan ibadah. ✓ mampu bergaul dengan sesama. ✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti. <p>Sikap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rajin melaksanakan ibadah. ✓ mampu bergaul dengan sesama. ✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti. <p>Keterampilan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ telah memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yang mandiri (seperti: tata boga, merajut, pertanian, dll) sehingga nantinya dapat disalurkan pada sektor usaha/ lapangan kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki kelayan.

No	PPKS	Jumlah PPKS dlm Panti (org)	Jumlah PPKS Mandiri (org)	Keterangan Kemandirian
4.	Anak Terlantar pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung (Anak Putus Sekolah Dan Anak Asuh)	220	145	<p>Pengetahuan, sebagai berikut:</p> <p>1. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memahami ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya tidak dimiliki seperti menjahit, membordir, tata boga, otomotif, las, listrik, elektronik. ✓ mengetahui peraturan tentang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja Mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. <p>2. Anak Asuh</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperoleh pengetahuan pendidikan dasar dari SD sd SLTA. <p>Sikap, sebagai berikut:</p> <p>1. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. ✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam panti.
5.	Anak terlantar pada UPTD PSAA Trimurni Padang Panjang (Anak Asuh)	100	72	<p>1. Anak Asuh</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. ✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti.
6.	Anak terlantar pada UPTD PSBR Harapan Padang Panjang (Anak Putus Sekolah)	184	173	<p>Keterampilan, sebagai berikut:</p> <p>1. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ menguasai keterampilan yang dapat dipergunakan

No	PPKS	Jumlah PPKS dlm Panti (org)	Jumlah PPKS Mandiri (org)	Keterangan Kemandirian
				<p>untuk melanjutkan kehidupan yg mandiri (seperti: menjahit, membordir, tata boga, elektro, listrik, otomotif dan las).</p> <p>✓ membuat rencana kegiatan untuk memulai usaha (berupa rencana anggaran biaya usaha).</p> <p>2. Anak Asuh mampu menguasai keterampilan tertentu yang diajarkan di dalam Panti seperti tahfiz, musik, tari,dll</p>
7.	Lanjut usia terlantar pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	110	73	<p>Pengetahuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> . mengetahui hal-hal dasar tentang fisik, mental, spritual dan sosial . . mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat <p>Sikap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> . mampu bergaul dengan teman-temannya. . mampu meningkatkan kepedulian antar sesama kelayan. . mematuhi peraturan yang berlaku di dalam panti
8	Lanjut usia terlantar pada PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	70	58	<p>Keterampilan sebagai berikut:</p> <p>mampu menyalurkan bakat dan kemampuan dalam pengisian waktu luang (menganyam, merajut, dan pembuatan telur asin, pertanian, beternak ikan)</p>
	Jumlah Total	878	650	

Sumber : Data Hasil Penilaian Kemandirian PPKS oleh 8 UPTD Tahun 2025 (Diolah)

Adapun target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator sasaran 1 (satu) yaitu persentase PPKS yang mandiri dapat direalisasikan sebesar 74,03 % dari target sebesar 65 % atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 113,89 %, termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pembangunan kesejahteraan sosial telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kemandirian PPKS di Sumatera Barat.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian PPKS Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	65 %	74,03 %	113,89
	Rata-rata Capaian				113,89

Sumber: Data Kemandirian PPKS pada UPTD-UPTD Tahun 2025 (Diolah)

$$\text{Target Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Kelayan Mandiri}}{\text{Jumlah Kelayan Panti}} \times 100 \%$$

$$\text{Target Kinerja} = \frac{650}{878} \times 100 \% = 74,03 \%$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dimana untuk indikator kemandirian PPKS tahun 2025 sebesar 74,03 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 60 %, mengalami peningkatan sebesar 14,03 %. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan realisasi PPKS yang mandiri dari target yang telah ditetapkan pada beberapa UPTD, seperti UPTD PSBN Tuah Sakato jumlah PPKS mandirinya tahun 2024 hanya 28 orang PPKS, namun tahun ini mencapai 38 orang PPKS (jumlah target atau sasaran PPKSnya pada kedua tahun tersebut memang berbeda, tetapi persentase capaiannya lebih tinggi pada tahun 2025, dimana tahun 2024 jumlah PPKS yang diampu sebanyak 50 orang dan tahun 2025 berkurang menjadi 44 orang). Selanjutnya UPTD PSBG Harapan Ibu Padang juga

mengalami peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya hanya 25 orang PPKS yang mandiri, namun tahun 2025 ini meningkat menjadi 47 orang PPKS. Kenaikan juga terjadi pada UPTD PSKW Andam Dewi, UPTD PSAABR Budi Utama, UPTD PSAA Trimurni, dan UPTD PSBR Harapan. Hal ini tidak terlepas dari segala upaya mewujudkan kemandirian bagi PPKS yang diberikan oleh para pekerja sosial maupun pembinaan dan motivasi oleh pejabat struktural dengan berpedoman kepada variabel-variabel kemandirian PPKS yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaian kinerja selama periode rencana strategis 2021-2025 tidak bisa dilakukan karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun ke tiga (2023) pada saat dilakukan harmonisasi kembali renstra awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2023 capaian indikator kemandirian PPKS ini sebesar 59 % dan pada tahun 2024 capaiannya meningkat menjadi 60 %.

Sasaran strategis dan indikator kinerja kemandirian PPKS ini pada tahun 2025 meningkat menjadi 74,03 % melalui pelaksanaan program rehabilitasi sosial, program penanganan bencana, program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial serta program pengelolaan taman makam pahlawan. Indikator kinerja untuk persentase PPKS yang mandiri menjadi salah satu yang wajib kita penuhi karena sebagian besar anggarannya merupakan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Provinsi.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah (Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026) menunjukkan tingkat ketercapaian kinerja yang melebihi dari target tahun 2026 mendatang. Target yang ingin dicapai tahun 2026 adalah tingkat kemandirian PPKS sebanyak 70 %, dan terealisasi tahun 2025 ini sebanyak 74,03 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kemandirian PPKS
Tahun 2025 dengan Tahun Terakhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)

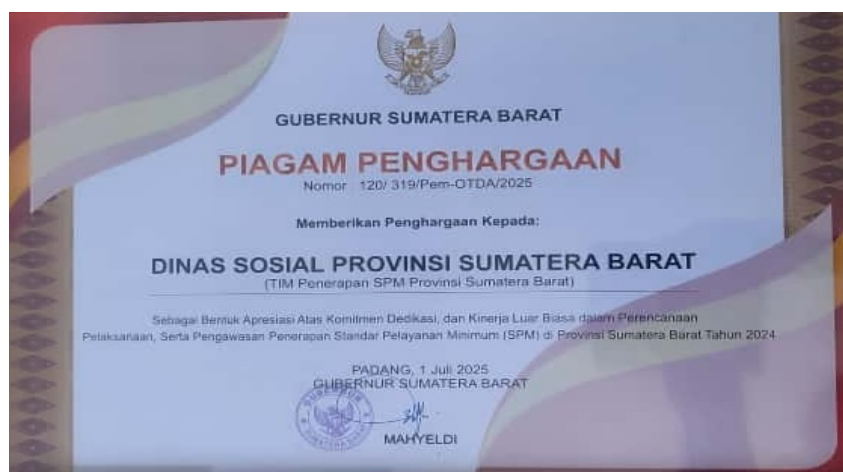
No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target Renstra 2026 (%)	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	74,03	70	105,76

Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Kemandirian PPKS Dinas Sosial, 2025

Sebagaimana data pada tabel 3.4, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 74,03 %, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026 untuk indikator persentase PPKS yang mandiri telah tercapai melebihi target atau sebesar sebesar 105,76 %. Indikator Persentase PPKS mandiri tersebut tidak diukur secara nasional dan belum ditemukan dinas sosial provinsi atau kabupaten/kota yang menyajikan indikator yang sama, sehingga tidak dapat dibandingkan secara nasional maupun regional.

Alhamdulillah, dengan perhatian yang meningkat dalam rangka pelayanan PPKS di dalam panti tersebut yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada tahun 2025 ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas komitmen, dedikasi, dan kinerja luar biasa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penerapan SPM.

Gambar 3.1
Piagam Penghargaan yang Diterima
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja kemandirian PPKS pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena indikator ini tidak digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun demikian, berlaku kaidah umum yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrumen, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi ketaatan terhadap instrumen tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam mencapai sasaran 1 antara lain:

- 1) PPKS yang dilayani di dalam panti adalah yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS Kementerian Sosial), sehingga lebih tepat sasaran. Sehubungan dengan perubahan sumber data dari DTKS ke DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), maka juga disandingkan dengan DTSEN tersebut mulai tahun 2025 ini.
- 2) Terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti pengusulan untuk penganggaran disesuaikan dengan jumlah target yang akan dilayani sehingga dapat menunjang peningkatan persentase PPKS yang mandiri.
- 3) Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial.
- 4) Adanya penguatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang terus berupaya memberikan motivasi kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial seperti dilaksanakannya bimbingan teknis untuk pengurus LKS serta peningkatan

kapasitas untuk PSKS dengan harapan dapat membantu tugas-tugas dinas sosial di lapangan.

Hambatan yang dihadapi terhadap capaian sasaran 1 sebagai berikut:

- 1) Penurunan pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dimana terjadinya efisiensi anggaran pada tahun 2025 ini sehingga dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada kelayan yang ada di dalam panti.
- 2) Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang sudah tidak ada sejak tahun 2022 sehingga mempengaruhi terhadap beberapa program seperti asistensi lanjut usia, sakti peksos, dan lain-lain.
- 3) Jumlah SDM yang belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan OPD. Seperti jumlah pekerja sosial yang ada tidak sebanding dengan jumlah kelayan yang dilayani. Satu orang pekerja sosial melayani 10 orang kelayan, tapi kenyataannya satu pekerja sosial melayani 50 orang kelayan.
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana pada UPTD-UPTD. Contohnya UPTD Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung, dimana alat-alat keterampilan otomotif yang dipakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, juga toolkit yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Contoh lainnya pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar untuk sarana dan prasarana pelayanan bagi lansia terlantar kondisinya sudah lama.
- 5) Kurangnya minat dan kemauan dari anak-anak remaja putri terlantar untuk mengikuti bimbingan sosial dan keterampilan pada UPTD Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang, sehingga pengembangan usahanya pasca pembinaan di UPTD belum berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan pada masa yang akan datang terhadap capaian sasaran 1:

- 1) Membuat inovasi kegiatan untuk bimbingan aktivitas hidup kelayan panti sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam menjalani rehabilitasi sosial di dalam panti.
- 2) Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan di dalam panti.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran meningkatnya kemandirian PPKS, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan pegawai yang saat ini berjumlah 151 orang yang terdapat pada dinas, tersebar di empat bidang, sekretariat serta 8 (delapan) UPTD. Dinas sosial dalam pencapaian kinerja organisasi didukung oleh fungsional pekerja sosial dan fungsional penyuluh sosial. Selain itu, di lapangan juga mempunyai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang selalu siap siaga dalam membantu kelancaran tugas.

2. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri dengan target 65 % pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 74,03 % dengan tingkat capaian sebesar 113,89 %, telah disediakan anggaran melalui APBD pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 58.671.974.327,- dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp. 49.481.868.033,- atau sebesar 84,34 %. Anggaran ini tersebar pada 5 (lima) program yaitu: 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 1.112.330.650,- yang terdiri atas 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, 2) Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp 55.350.245.441,- yang terdiri atas 5 kegiatan dengan 15 sub kegiatan, 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 372.258.315,- terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, 4) Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.769.597.166,- terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan anggaran sebesar Rp. 67.542.755,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran tahun 2025 dalam pencapaian indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\{(PA \times CK) - RA\}}{PA} \times 100 \% \\ &= \frac{\{(58.671.974.327 \times 113,89 \%) - 49.481.868.033\}}{58.671.974.327} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,35$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran = Rp. 58.671.974.327,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 113,89 %

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 49.481.868.033,-

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0 % - 100 % dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{tingkat efisiensi} / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,35/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 137,50 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 137,50 % (sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang nilai efisiensinya tercapai > 100%, maka nilai efisiensinya dibulatkan 100%) dalam mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya kemandirian PPKS dengan capaian indikator kinerja sebesar 113,89 %. Efisiensi terutama dilakukan dengan pengembalian DAU tagging kesehatan, pembinaan dan penguatan monitoring ke panti-panti milik masyarakat agar maksimal melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosialnya dan bagi kelayan atau PPKS yang tidak terdaftar DTSEN, maka dana hibahnya tidak dicairkan dan dikembalikan ke kas daerah. Selanjutnya juga dilakukan penguatan layanan pada UPTD-UPTD melalui peran aktif jajarannya UPTD beserta pekerja sosialnya dalam memandirikan PPKS nya masing-masing.

3.3.2. Tujuan 2: Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-2 yang menjadi tujuan jangka menengah perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani yang diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan 2) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan ke- 2 pada Tahun 2025

No	Tujuan ke-2	Indikator Tujuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra(%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,25	73,08	99,77	75,40	96,92
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85,05	86,25	101,41	85,50	100,88
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan ke- 2					100,59		98,90

Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Capaian nilai akuntabilitas kinerja tahun 2025 telah mendukung capaian target jangka menengah pada tahun akhir rencana strategis (tahun 2026) sebesar 96,92 %. Sedangkan untuk tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi telah dicapai dari target akhir tahun 2026 sebesar 100,88 %. Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani di atas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,59%. Jika dilihat pada target akhir jangka menengah (renstra), diprediksi target tujuan dapat tercapai dengan baik. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 2 sasaran strategis yaitu 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan; 2) meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada tahun 2025.

B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari *good governance* dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja ini memiliki beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Rencana Strategis (Renstra).
- c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- d. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT).
- e. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- f. Rencana Aksi Kinerja Tahunan.

Beberapa indikator akuntabilitas kinerja antara lain: a) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, b) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan c) adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Komponen-komponen dari penilaian kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Selanjutnya masing-masing komponen memiliki sub komponen yang sama yaitu keberadaan (20 %), kualitas (30 %), dan pemanfaatan (50 %). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Komponen-Komponen Penilaian Kinerja dan Pembobotannya

No	Komponen yang dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00

4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Sumber : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021

Indikator ini merupakan hasil implementasi program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Akuntabilitas kinerja bukan hanya sebatas pertanggungjawaban anggaran, namun akuntabilitas kinerja juga di analisis dari aspek perencanaan, konsistensi perencanaan terhadap penyerapan anggaran, dan realisasi dari target yang telah di sepakati. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (> 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (>80 – 90)	Memuaskan
BB (>70 – 80)	Sangat Baik
B (> 60 – 70)	Baik
CC (>50 – 60)	Cukup (Memadai)
C (>30 – 50)	Kurang
D (>0 – 30)	Sangat Kurang

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Pada tahun 2025 target indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” adalah dengan predikat BB (73,25) dan juga predikat BB (75,40) untuk target akhir renstra tahun 2026. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/147/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025, disebutkan bahwa hasil evaluasi terhadap AKIP Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 nilainya 73,08 dengan predikat BB, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 ini sebesar 99,77 %.

Adapun nilai hasil evaluasi per komponen penilaian yang diperoleh sebanyak 73,08 tersebut atau kategori BB dengan pengertian “Sangat Baik”, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Aspek Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,39
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,93
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,09
4	Evaluasi Internal	25,00	14,67
	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	73,08
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		73,08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			BB

Sumber: Hasil LAKIP dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai akuntabilitas kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu nilai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai total sebanyak 73,08. Persentase komponen penilaian tertinggi yang didapatkan adalah perencanaan kinerja dengan nilai 24,39 dari bobot 30 (81,3 %) dan persentase komponen terendah adalah pelaporan kinerja dengan nilai 14,67 dari bobot 25 (58,68 %).

Pencapaian nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target akhir rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana pada akhir tahun 2026 ditargetkan mendapatkan nilai 75,40 atau dengan predikat BB, maka capaian hasil AKIP tahun 2025 ini telah mendekati sasaran tersebut dengan

tingkat capaian 96,92 %. Kita optimis pada tahun 2026 mendatang akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 3.8 berikut ini disajikan target dan realisasi kinerja AKIP tahun 2025 dan perbandingannya dengan target akhir rencana strategis tahun 2026.

Tabel 3.8
Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan
Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025 (Predikat)	Realisasi 2025 (Predikat)	Capaian 2025 (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,25)	BB (73,08)	99,77

Sumber: Hasil LAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dasar perhitungan:

Realisasi 2025 = Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Target

= $\frac{73,08}{73,25} \times 100 \%$

73,25

= 99,77 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Kemudian perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan 4 (empat) tahun sebelumnya menunjukkan capaian yang paling tinggi pada tahun 2025 tersebut. Pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian AKIP ini dari sebelumnya 71,04 (tahun 2022) menjadi 66,72 pada tahun 2023. Tabel 3.9 berikut ini ditampilkan capaian kinerja akuntabilitas kinerja organisasi selama 5 (lima) tahun terakhir per komponen yang dinilai.

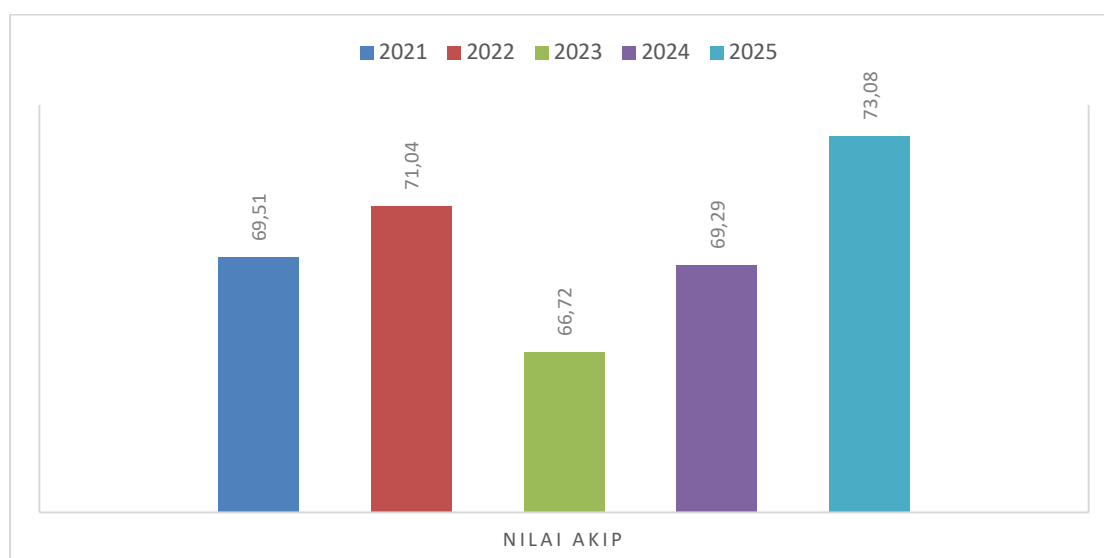
Tabel 3.9
Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Per Komponen Tahun 2021-2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	26,37	26,37	24,38	23,25	24,39
Pengukuran Kinerja	16,81	17,15	20,38	22,05	21,93
Pelaporan Kinerja	10,78	10,78	10,38	10,32	12,09
Evaluasi Internal	6,3	6,3	11,58	13,67	14,67
Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	9,25	10,44	0	0	0
Jumlah	69,51	71,04	66,72	69,29	73,08

Sumber : LHE AKIP Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (Diolah)

Secara keseluruhan, perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2021 sampai dengan tahun 2025) mengalami fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2
Realisasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2025



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inpektorat Daerah Tahun 2021-2025

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pencapaian nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target akhir rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana pada akhir tahun 2026 ditargetkan mendapatkan nilai 75,40 atau dengan predikat BB, maka capaian hasil AKIP tahun 2025 ini telah mendekati sasaran tersebut dengan tingkat capaian 96,92 %. Kita optimis pada tahun 2026 mendatang akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 3.8 berikut ini disajikan target dan realisasi kinerja AKIP tahun 2025 dan perbandingannya dengan target akhir rencana strategis tahun 2026.

Tabel 3.10

Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025 (Predikat)	Target Renstra 2026 (Predikat)	Capaian Renstra (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,08)	BB (75,40)	96,92

Sumber: Hasil LAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena laporan kinerja Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2025 belum terbit (belum muncul pada website Kementerian Sosial) hingga laporan kinerja ini diterbitkan. Namun demikian, berlaku kaidah umum yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrumen, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi ketaatan terhadap instrumen tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam mencapai sasaran 2 tersebut antara lain:

1. Melakukan penyesuaian kembali indikator tujuan, indikator sasaran, pohon kinerja maupun cascading kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2029, rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maupun NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait.
2. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja, baik berupa rapat pembahasan khusus terkait dokumen-dokumen perencanaan, rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di internal Dinas Sosial, forum konsultasi publik rancangan awal rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
3. Memastikan komitmen bersama untuk melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari eselon 2 hingga koordinator dan staf.
4. Mendorong bidang-bidang bersama dengan sekretariat menyusun rencana aksi mengacu kepada SKP.
5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN mulai dari level pimpinan sampai ke level individu dengan mengikuti diklat, bimbingan teknis, dan sejenisnya.
6. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial.
7. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak.

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja untuk mencapai sasaran kinerja ini secara signifikan tidak ada, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan, yaitu:

- 1) Pemantauan terhadap rencana aksi dan realisasinya belum dilakukan setiap bulan dan lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, maka diperlukan adanya pembahasan terhadap target kinerja secara berkala dalam

tahun berjalan, hambatan dan kendala yang dihadapi, dan arahan pimpinan untuk meningkatkan komitmen para pejabat struktural dan pelaksana kegiatan.

- 2) Pemantauan terhadap rencana aksi dan realisasinya agar dilakukan secara berjenjang.
- 3) Pengukuran dan pemantauan kinerja agar dilakukan secara memadai dan berkala.
- 4) Belum seluruh unit/satuan kerja serta pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 5) Pelaporan kinerja agar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- 6) Pemantauan kinerja internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 7) Pemantauan capaian kinerja internal agar menggunakan teknologi informasi secara optimal.
- 8) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP agar digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 9) Tim SAKIP yang telah dibentuk untuk menjalankan tugasnya secara optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja organisasi dengan indikator kinerja “nilai akuntabilitas kinerja OPD”, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melaksanakan 1 (satu) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 125 (seratus dua puluh lima) sub kegiatan. Termasuk didalam program ini kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dukungan anggaran pada tahun 2025 ini dengan mengacu kepada DPA Perubahan Tahun 2025 sebanyak Rp. 32.920.428.743,- dan terealisasi sampai 31 Desember 2025 adalah Rp. 31.268.483.816,- (94,98 %).

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK - RA)}{PA} \times 100 \% \\ &= \frac{(32.920.428.743,- \times 99,97 \% - 31.268.483.816)}{32.920.428.743} \times 100 \%\end{aligned}$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,053$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran = Rp. 32.920.428.743,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 99,97 %

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 31.268.483.816,-

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0 % - 100 % dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{tingkat efisiensi} / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,053/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 63,25 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 63,25 % dalam mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,97 %. Tingkat efisiensi yang masih dibawah 100 % ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya melalui peningkatan capaian kinerja dan melaksanakan efisiensi dan efektifitas anggaran, waktu dan sumber daya lainnya untuk mencapai *output* dan *outcome* secara maksimal.

C. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan (tahun 2025) dan pelaksanaan survei tersebut telah menggunakan aplikasi <https://sepakat.sumbarprov.go.id/>.

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan tersebut, terdapat sebanyak 207 orang responden yang mengisi link aplikasi melalui akun email masing-masing responden, juga terdapat nomor whatsapp yang hanya bisa digunakan untuk satu kali survey. Seluruh unsur diukur tingkat kepuasannya secara daring menggunakan form digital yang dapat diakses melalui *smartphone* dan komputer. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengetahui nilai masing-masing dan keseluruhan dari 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang dinilai dalam kuesioner SKM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur Pelayanan

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Indikasi Pungutan Liar oleh Petugas

Indikasi pungutan liar oleh petugas adalah kemungkinan-kemungkinan adanya pungutan diluar aturan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas.

5. Produk Pelayanan

Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi layanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

7. Sikap Petugas

Sikap petugas adalah sikap pemberi layanan dalam memberikan pelayanan.

8. Petugas Menindaklanjuti Keluhan dan Saran

Menindaklanjuti keluhan dan saran adalah tata cara pelaksanaan tindak lanjut terkait keluhan dan saran.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan pedoman dari pelaksanaan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat, maka penetapan nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan untuk pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber : PermenPANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya, untuk pengolahan data dalam pelaksanaan penilaian survey kepuasan masyarakat ini dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-Rata Tertimbang” masing-masing dari unsur pelayanan. Dalam penghitungannya terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama yaitu 0,11. Nilai 0,11 tersebut didapatkan dari pembagian jumlah bobot dengan seluruh jumlah unsur sebagaimana dapat dilihat pada rumus berikut ini:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai Rata – Rata (NRR) tertimbang dengan rumus:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survey kepuasan masyarakat dengan rentang nilai antara 25-100, maka hasil penilaian per unsur pelayanan maupun hasil total penilaian SKM tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25. Sehingga nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber : PermenPANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Penilaian tingkat kepuasan ini meliputi 2 (dua) unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu layanan yang diberikan oleh SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu pada 8 (delapan) UPTD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 128 panti milik masyarakat yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial pada tahun 2025 ini. Juga masyarakat yang datang langsung ke Dinas Sosial untuk mendapatkan data dan informasi, menyampaikan permasalahannya, maupun mereka yang mendapatkan bantuan atau program tahun 2025. Berikut ini ditampilkan hasil penilaian survey kepuasan masyarakat terhadap Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per unsur pelayanannya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13
Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,46
2	Prosedur Pelayanan	3,37
3	Waktu Pelayanan	3,37
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,75
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,43
6	Kompetensi Pelaksana	3,45
7	Perilaku Pelaksana	3,50
8	Penanganan Pengaduan	3,30
9	Sarana dan Prasarana	3,74

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survey, 2025

Selanjutnya, untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{No.1} \times 0,11) + (\text{No.2} \times 0,11) + (\text{No.3} \times 0,11) + (\text{No.4} \times 0,11) + \\ & (\text{No.5} \times 0,11) + (\text{No.6} \times 0,11) + (\text{No.7} \times 0,11) + (\text{No.8} \times 0,11) + (\text{No.9} \\ & \times 0,11) = 3,45 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai SKM unit Pelayanan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar
= 3,45 X 25
= **86,25**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 bernilai 86,25 atau dengan kategori baik. Selengkapny hasil penilaian survey kepuasan masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdapat pada lampiran dokumen laporan kinerja ini.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut di atas menunjukkan tercapainya target tahunan terhadap kinerja ini sebagaimana yang ditetapkan pada rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, karena pada tahun 2025 ini ditargetkan sebesar 85,05 dan tercapai 86,25 atau capaiannya sebesar 101,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kelayan panti dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah puas. Walaupun demikian, kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat akan terus dievaluasi dan ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan semakin lebih baik dan mencapai tingkat sangat baik. Tabel 3.14 di bawah ini menggambarkan capaian kinerja yang telah dijelaskan di atas.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (85,05)	B (86,25)	101,41
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,41

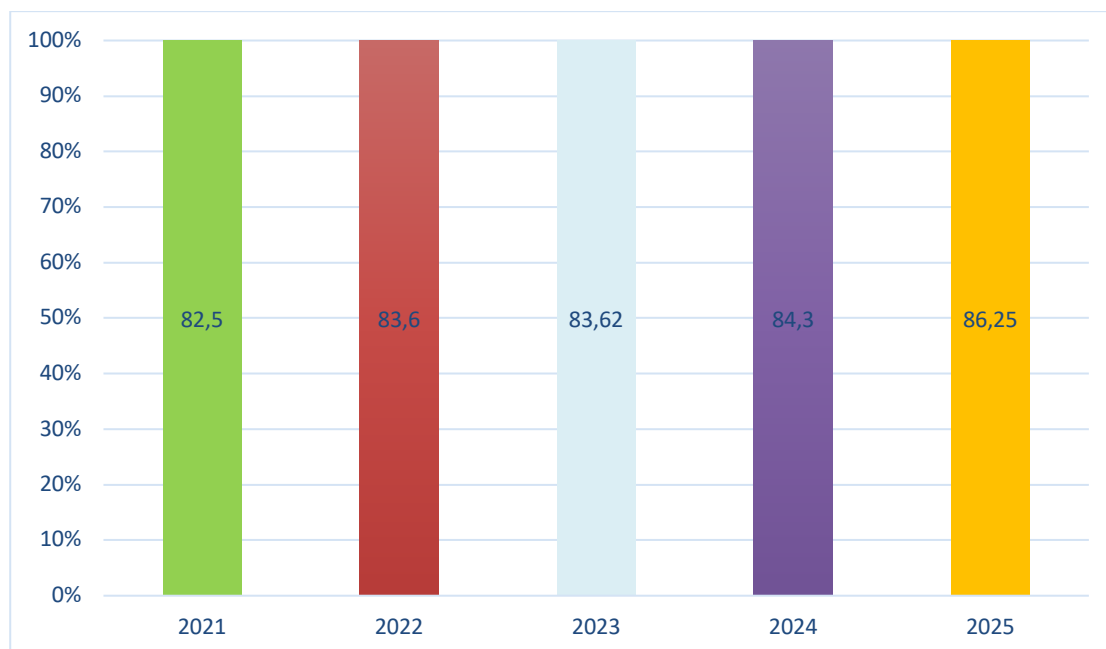
Sumber: Hasil Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), 2025

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif atau meningkat. Pada tahun 2021 realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar 82,50, pada tahun 2022 sebesar 83,60, tahun 2023 83,62, tahun 2024 84,30, dan pada tahun 2025 meningkat kembali menjadi 86,25. Perkembangan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.3.

Grafik 3.3

Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2025



Sumber: Hasil SKM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (Diolah)

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen rencana strategis dapat dilihat pada tabel 3.15. Sesuai dengan target indikator kinerja untuk tingkat kepuasan

terhadap pelayanan organisasi ini pada tahun 2026 sebesar 85,50, maka tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 ini sudah melebihi target renstra tersebut karena sudah tercapai dengan nilai 86,25. Dengan demikian, maka untuk periode tahun-tahun mendatang atau pada periode rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029, penetapan targetnya harus di atas dari capaian kinerja tahun 2025.

Tabel 3.15
Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dan
Perbandingannya dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025 (Predikat)	Realisasi 2025 (Predikat)	Capaian 2025 (%)	Target Renstra 2026 (Predikat)	Capaian Renstra (%)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85,05 (B)	86,25 (B)	101,41	85,50 (B)	100,88

Sumber: Hasil LAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2025 belum terbit (belum muncul pada website Kementerian Sosial) hingga laporan kinerja ini diterbitkan. Namun demikian, berlaku kaidah umum yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrumen, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi ketaatan terhadap instrumen tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Menyempurnakan dan mengupdate berita kinerja Dinas Sosial pada media sosial dan website resmi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Survei kepuasan masyarakat mendapatkan respon yang positif dari responden.
3. Melakukan penyempurnaan terhadap SOP Pelayanan.
4. Melakukan rapat rutin terkait pemantauan kinerja sampai level individu secara berkala.

Hal ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya-upaya peningkatan kinerja dan komitmen yang tinggi organisasi dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat, agar dapat mencapai target akhir rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 terhadap indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja ini, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja tersebut, diantaranya:

1. SDM yang mengelola dan mengoperasikan aplikasi masih terbatas di sekretariat dinas, sementara pada UPTD-UPTD belum berjalan dengan optimal. Mengingat pelayanan yang banyak dilakukan sesuai kewenangan provinsi adalah yang berada di dalam panti. Disisi lain, aplikasi SEPAKAT milik Provinsi Sumatera Barat ini juga baru dimulai pelaksanaannya pada tahun 2025.
2. Belum maksimalnya seluruh tamu Dinas Sosial yang mengakses media survei.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan pelayanan dasar khususnya pada UPTD-UPTD. Hasil survei pada unsur sarana dan prasarana juga menunjukkan hasil yang menurun antara tahun 2025 (3,74) dengan tahun 2024 (3,86).
4. Penyebarluasan informasi terkait pelayanan yang belum merata sampai ke penerima layanan.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2026, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya:

- 1) Menetapkan petugas SDM yang mengoperasikan aplikasi SEPAKAT pada dinas dan UPTD-UPTD yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
- 2) Memastikan SDM pelaksana pelayanan termasuk *front office* telah menerapkan budaya BerAKHLAK.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan.

4) Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi melalui *website* dan portal sosial media Dinas Sosial.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, diperlukan SDM petugas yang telah ditunjuk untuk menjelaskan kepada responden, baik kelayan pada UPTD-UPTD, penerima manfaat program hibah pada panti-panti masyarakat, bantuan perlindungan sosial untuk korban bencana alam dan bencana sosial, penerima manfaat program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin maupun mereka yang datang ke Dinas Sosial untuk tujuan mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan sosial. Mereka hanya ditugaskan untuk menjelaskan dengan baik terkait unsur-unsur dalam pelayanan yang ada pada aplikasi, selanjutnya dengan menggunakan media *smartphone* dari masing-masing responden diminta mereka melakukan survey dengan jujur tanpa adanya intervensi.

Apabila pelaksanaan ini dapat dimaksimalkan pada tahun-tahun mendatang dengan meningkatkan jumlah responden yang mengisi survey, maka akan semakin menggambarkan kondisi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Terhadap ruang-ruang yang membutuhkan perbaikan pelayanan akan menjadi bahan masukan dan perencanaan di masa-masa mendatang. Kesimpulannya untuk pelaksanaan kinerja ini dapat dilaksanakan dengan maksimal pada tahun-tahun yang akan datang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dinas dan UPTD-UPTD, tidak membutuhkan sarana dan prasarana tambahan yang membutuhkan anggaran. Jika pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat layanan dilaksanakan dengan baik di sepanjang waktu oleh seluruh pejabat maupun staf, maka tentu saja akan menghasilkan penilaian yang sangat baik pula dari penerima manfaat tersebut.

Untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK - RA)}{PA} \times 100 \% \\ &= \frac{(32.920.428.743,- \times 101,41 \% - 31.268.483.816)}{32.920.428.743} \times 100 \%\end{aligned}$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,0677$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran = Rp. 32.920.428.743,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 101,41 %

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 31.268.483.816,-

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0 % - 100 % dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{tingkat efisiensi} / 20) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,0677/20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 66,93 \%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 66,93 % dalam mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,41 %. Tingkat efisiensi yang masih dibawah 100 % atau 66,93 % ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya melalui peningkatan capaian kinerja dan melaksanakan efisiensi dan efektifitas anggaran, waktu dan sumber daya lainnya untuk mencapai *output* dan *outcome* secara maksimal.

Adapun gambaran perbandingan realisasi kinerja dengan Kementerian Sosial maupun beberapa Dinas Sosial Provinsi di tingkat nasional dan regional Sumatera dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja dengan Kementerian Sosial dan
Beberapa Instansi Dinas Sosial Provinsi di Tingkat Pusat dan Regional
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran Kinerja	Realisasi Kinerja					
		Dinsos Prov Sumbar	Kemensos	Dinsos Prov DKI Jakarta	Dinsos Prov Jawa Tengah	Dinsos Prov Aceh	Dinsos Prov Riau
1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	60	-	-	-	-	-
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	69,29	-	-	-	75,35	62,55
3	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	84,30	90,52	93,76	88,50	-	79,32

Sumber : Dokumen Laporan Kinerja Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Aceh, dan Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2024

3.4 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja Dinas Sosial dari sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program 19 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 90.092.403.070,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial. Adapun realisasi program terhadap anggaran dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2025

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Meningkatkan Kemandirian PPKS		11	58.671.974.327	49.481.868.033
1	Program Pemberdayaan Sosial	2	1.112.330.650	779.566.000
2	Program Rehabilitasi Sosial	5	55.350.245.441	48.064.417.409
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	372.258.315	337.320.200
4	Program Penanganan Bencana	1	1.769.597.166	233.133.424

5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	67.542.755	67.431.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		8	32.920.428.743	31.261.069.816
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8	32.920.428.743	31.261.069.816
Jumlah		19	91.592.403.070	80.742.937.849

Sumber: Hasil Analisis Anggaran dan Realisasi Program Dinas Sosial Tahun 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 91.592.403.070,- terealisasi seluruh kegiatan sebesar Rp. 80.742.937.849,- atau 88,15 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran 1, 2 dan 3 terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 10.849.465.221,- (11,85 %).

Selanjutnya, jumlah anggaran sebesar Rp. 58.671.974.327,- untuk mencapai sasaran 1 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.481.868.033,- atau 84,34 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.190.106.294 (15,66 %). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kemandirian PPKS (113,89 %) lebih tinggi dari realisasi anggaran 84,34 %. Kemudian dari jumlah anggaran sebesar Rp. 32.920.428.743 untuk mewujudkan sasaran 2 dan 3 terealisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 31.261.069.816 atau 94,96 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.659.358.927,-. Capaian rata-rata indikator sasaran 2 dan sasaran 3 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian sasaran dimaksud juga lebih tinggi yaitu 100,59 % berbanding 94,96 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP Dinas Sosial disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKjIP Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi juga terjalin dengan baik dengan instansi lain di tingkat provinsi, kementerian sosial serta partisipasi masyarakat melalui kelembagaan sosial.

Berdasarkan paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam BAB per BAB, ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja dari ketiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 105,02 %, dengan realisasi anggaran sebesar 88,15 %. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran serta pengelolaan sumber daya dengan baik yang sangat penting untuk mendukung berbagai inisiatif sosial.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal pengelolaan data penerima hibah program rehabilitasi sosial dan peningkatan kualitas sarana prasarana panti sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan program, serta meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Capaian dan tantangan yang ada, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah-langkah strategis dan evaluasi berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

4.2 Saran

Untuk memastikan bahwa kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal, maka dengan ini disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih cermat dengan melakukan analisis kebutuhan yang mendalam dan penyesuaian anggaran sesuai dengan prioritas program. Melalui perencanaan yang matang diharapkan penggunaan dana dapat dioptimalkan, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial juga menjadi hal yang sangat penting. Dinas Sosial perlu mengembangkan prosedur operasional yang jelas dan memberikan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat dari layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga harus ditingkatkan. Dinas Sosial dapat mengembangkan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Melalui memberdayakan masyarakat, diharapkan mereka dapat mandiri dan berkontribusi lebih dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan mereka.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana UPTD serta panti-panti swasta milik masyarakat juga sangat penting untuk mendukung mutu layanan. Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi fasilitas yang ada dan merencanakan perbaikan atau pengadaan sarana yang diperlukan. Dukungan fasilitas yang memadai tersebut, maka diharapkan layanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih optimal.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti OPD lain di tingkat provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kerjasama ini dapat memperkuat jaringan dukungan sosial dan memperluas jangkauan program-program yang ada. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan juga sangat penting. Hal ini akan membantu Dinas Sosial dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap relevan dan efektif.

Berdasarkan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan selama ini dan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan kinerjanya untuk periode pembangunan daerah 2025-2029 yang baru dimulai pelaksanaannya tahun 2025 ini. Khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tergolong PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu di dalam panti.

Padang, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Barat

Drs. SYAIFULLAH, MM

NIP. 19680905 199702 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Padang, Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284, 25137
e-mail : dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SYAIFULLAH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

Drs. SYAIFULLAH, MM
NIP. 19680905 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	65%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73,25)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	B (85,05)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 32.384.237.401	APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.717.422.300	APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 57.967.675.040	APBD
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 972.188.429	APBD
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 655.431.600	APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 131.499.173	APBD
JUMLAH	Rp. 93.828.453.934	

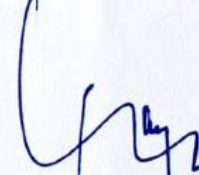
Padang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,



Drs. SYAIFULLAH, MM
NIP. 19680905 199702 1 002



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025



**NOMOR : 700/147/LHE/INSP/2025
TANGGAL : 24 JULI 2025**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : DINAS SOSIAL
TAHUN : 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-177-2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/110/ INSP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara

konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya.
6. Periode Evaluasi Tahun 2025.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal Mei 19 s.d 20 Juni 2025.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Andri Yulika |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Alfianori |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : 1) Jelita Alamsyah
2) Dewi Selvie
3) Fakhru Rozi |
| 5. Anggota | : 1) Khairul
2) Gerhana Bulan Butet Lubis
3) Yanti Jastiva
4) Viranita Arief
5) Yunhesvo Melya
6) Ranita Jasman
7) Jelly Nostiva
8) Egi Kurniawan
9) Muthia Ramatri |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan

	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **73,08** kategori **BB** dengan pengertian **Sangat Baik**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,39
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,93
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,09
4.	Evaluasi Internal	25,00	14,67
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	73,08
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		73,08
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 24,39 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah membuat dan menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja, yang terdiri dari:
 - 1) Perencanaan kinerja jangka menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja, (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).
 - 3) Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu rencana aksi.
 - 4) Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Terdapat Sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) eselon III belum dicantumkan atau dijabarkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga dokumen perencanaan belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan secara memadai.
 - 2) Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik. Rata-rata capaian kinerja tahun 2024 masih dibawah 100%.
 - 3) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya mengukur capaian kinerja sampai dengan tingkat individu.
 - 4) Dokumen Pemantauan Kinerja (Laporan/Notulen Monitoring Capaian Kinerja Berkala) belum menjelaskan rekomendasi perbaikan-perbaikan/penyempurnaan untuk merevisi rencana aksi
 - 5) Belum seluruh pegawai sepenuhnya peduli dan memahami serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 21,93 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi.
- b. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
 - 1) IKU yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja tidak dilengkapi dengan *baseline* data yang valid dan terukur sebagai nilai awal (*starting point*) yang menjadi titik ukur capaian target dan evaluasi kinerja dari tahun ke tahun.
 - 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkat individu.
 - 3) Capaian Kinerja Tahun 2024 belum sepenuhnya lebih baik atau meningkat dari Tahun 2023, yaitu pada sasaran Meningkatkan

Kemandirian PPKS dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

- 4) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran.
- 5) Laporan/Notulen hasil monitoring pencapaian kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian dalam pencapaian kinerja dan belum menggambarkan perbaikan rencana aksi secara berkala,
- 6) Belum sepenuhnya pegawai memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **12,09** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, direviu dan dipublikasikan serta sudah disampaikan tepat waktu.
- b. Laporan Kinerja telah disusun sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025.
- c. Laporan Kinerja sudah menginformasikan analisis data perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, dengan beberapa tahun terakhir dan dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi upaya-upaya efisiensi yang dilakukan secara kuantitatif pada masing-masing sasaran.
 - 2) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja/Rekomendasi Perbaikan Kinerja ke depan.
 - 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran dan penyesuaian perencanaan dalam mencapai keberhasilan kinerja.
 - 4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam melakukan evaluasi perencanaan dan pencapaian kinerja serta belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar **14,67** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi, dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan.
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan dengan pendalaman yang memadai.
 - 2) Laporan/notulen hasil pemantauan capaian kinerja belum sepenuhnya menggambarkan secara jelas permasalahan dan upaya penyelesaian yang dilakukan serta saran perbaikan.

- 3) Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja dari tahun sebelumnya.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian PK dengan SKP, sehingga menyajikan informasi hubungan yang berkesinambungan dan selaras antara sasaran/indikator kinerja yang akan dicapai sampai pada level terbawah.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang realistis dan terukur dan melakukan upaya pencapaian target melalui penguatan pelaksanaan program, percepatan penyelesaian hambatan serta pengendalian kinerja yang efektif dan berkelanjutan.
- c. Melakukan pemantauan Rencana Aksi setiap bulan yang dituangkan dalam notulen rapat meliputi pembahasan target kinerja, pembahasan hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan/pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas untuk seluruh bidang.
- d. Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang, dengan mendokumentasikan bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di setiap level unit sampai individu.
- e. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja/bagian/sub bagian dan seluruh pegawai atas pencapaian target kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan evaluasi terhadap IKU dengan melengkapi baseline yang valid dan terukur sebagai nilai awal (starting point) yang menjadi titik ukur capaian target dan evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya.
- b. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang dan berkala hingga tingkat individu melalui penyesuaian indikator organisasi dengan SKP pegawai dan cascading kinerja.
- c. Meningkatkan kinerja dengan mencapai kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama terhadap sasaran dan indikator kinerja yang capaiannya belum lebih baik dari tahun sebelumnya.
- d. Melakukan penguatan mekanisme pengukuran kinerja agar mampu menggambarkan secara menyeluruh penyesuaian terhadap strategi, kebijakan, aktivitas, dan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan hasil monitoring sebagai dasar penyesuaian dalam pencapaian kinerja, menyusun dan memperbarui rencana aksi secara berkala berdasarkan hasil monitoring tersebut.
- f. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai terkait pentingnya pengukuran kinerja, serta mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam perbaikan kinerja individu maupun organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyajikan Laporan Kinerja dengan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya secara menyeluruh untuk seluruh sasaran kinerja.
- b. Mengintegrasikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke

dalam Laporan Kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

- c. Mengoptimalkan penggunaan informasi realisasi rencana aksi dalam melakukan penyesuaian aktivitas, alokasi anggaran, serta perencanaan ke depan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar dalam mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerja, serta mendorong penguatan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara lebih mendalam dan komprehensif, mencakup analisis terhadap pencapaian, kendala serta faktor penyebabnya.
- b. Menyusun laporan/notulen hasil pemantauan capaian kinerja dengan memuat secara jelas permasalahan, upaya penyelesaian yang telah dilakukan, serta saran perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
- c. Mengoptimalkan hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



PIK INSPEKTUR,

ANDRI YULIKA, SH., M.HUM, CGCAE

Pembina Utama Madya
NIP.197210261997031003

dalam Laporan Kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

- c. Mengoptimalkan penggunaan informasi realisasi rencana aksi dalam melakukan penyesuaian aktivitas, alokasi anggaran, serta perencanaan ke depan.
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar dalam mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerja, serta mendorong penguatan budaya kinerja organisasi.
4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
- a. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara lebih mendalam dan komprehensif, mencakup analisis terhadap pencapaian, kendala serta faktor penyebabnya.
 - b. Menyusun laporan/notulen hasil pemantauan capaian kinerja dengan memuat secara jelas permasalahan, upaya penyelesaian yang telah dilakukan, serta saran perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
 - c. Mengoptimalkan hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pt. INSPEKTUR,



ANDRI YULIKA, SH., M.HUM, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP.197210261997031003

LAMPIRAN III

HASIL PENILAIAN KEMANDIRIAN PPKS (PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)

1. UPTD PSBN TUAH SAKATO PADANG

REKAPITULASI PENILAIAN INSTRUMEN KEMANDIRIAN
DISABILITAS NETRA PADA UPTD PSBN TUAH SAKATO PADANG
TAHUN 2025

NO	NAMA	KELAS	JUMLAH SKOR	SKOR AKHIR	MANDIRI / KURANG MANDIRI	KET
1	RIZKI EKA PUTRA	PERSIAPAN	82	91.00	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
2	ROPIL WIJAYA	PERSIAPAN	68	75.50	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
3	ERICSSON MAY SIREGAR	PERSIAPAN	72	80.00	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
4	YUDI S	PERSIAPAN	77	85.50	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
5	KHAIRUL MUSTAFA	PERSIAPAN	62	68.80	KURANG MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
6	M. SIDDIK	PERSIAPAN	76	84.40	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
7	EFBRO NOJOKO	PERSIAPAN	81	90.00	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
8	SUKARDI	PERSIAPAN	75	83.30	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
9	ILHAM SAPUTRA	PERSIAPAN	73	81.10	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
10	DESYEDI	PERSIAPAN	73	81.10	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
11	M. IQBAL	PERSIAPAN	85	94.40	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
12	EDO SAPUTRA	PERSIAPAN	73	81.10	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
13	HAZIZUL H	PERSIAPAN	74	82.20	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
14	ASLI PRISGA	PERSIAPAN	78	86.60	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
15	RAHMAT SYARIF	PERSIAPAN	81	90.00	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
16	KIKI ANDIKA	PERSIAPAN	84	93.30	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
17	SYARI BANJUN	PERSIAPAN	82	91.10	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
18	SITI AMINAH	PERSIAPAN	71	78.80	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
19	NANDA MANDALA	PERSIAPAN	87	96.60	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 18 Pertanyaan
20	REHAN SYAFRIANTO	DASAR	81	85.20	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
21	HARMONIS	DASAR	78	82.10	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
22	DEWI SHAFIRA	DASAR	84	88.40	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
23	GILANG FERNANDES	DASAR	80	84.20	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
24	RISMAN	DASAR	82	86.30	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
25	TRI AMESI	DASAR	82	86.30	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
26	RISKI FERNANDO	DASAR	82	86.30	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
27	RIKA NOVRIANTI	DASAR	84	88.40	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
28	RANDAL	DASAR	81	85.20	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
29	EKA SATRIA	DASAR	82	86.30	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
30	YENI FARIDA	DASAR	79	83.10	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
31	FITRO FAJAREZ	DASAR	80	84.20	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
32	DERIZUL VAHMI	LANJUTAN	80	84.20	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
33	YADI	LANJUTAN	72	75.70	KURANG MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
34	MARIO RAMADHAN	LANJUTAN	86	90.50	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
35	ALGUSRI MEDIA PUTRA	LANJUTAN	77	81.05	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
36	FRIYANDA	LANJUTAN	73	76.80	KURANG MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
37	TEGAR SUYENDRA	LANJUTAN	68	71.50	KURANG MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
38	ZIKRA IRRAWAN	LANJUTAN	73	76.80	KURANG MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
39	FAIRI	LANJUTAN	72	75.70	KURANG MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
40	M. ADITIA WINDRI	LANJUTAN	78	82.10	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
41	INDRA PRATAMA	LANJUTAN	72	75.70	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
42	M. HUZAINI	LANJUTAN	80	84.20	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
43	YENI W.	LANJUTAN	89	93.60	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan
44	NOVEA RESDA	LANJUTAN	74	77.80	MANDIRI	3 Indikator (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)= 19 Pertanyaan

Mengetahui,
Kepala UPTD PSBN Tuah Sakato Padang



SAYARNI S. Sos. MM
NIP. 19690621 199103 2 004

2. UPTD PSBG HARAPAN IBU PADANG

Rekapitulasi Skor Kemandirian

No	Nama	Skor Indikator																								Jumlah	Skor Akhir	Mandiri/ Tdk Mandiri		
		Pengetahuan									Sikap									Keterampilan										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6					
1	Nurhayati	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	63	54,78	Tidak Mandiri	
2	Ari Aldon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	43	37,39	Tidak Mandiri	
3	Handika Fernando	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	119	103,48	Mandiri	
4	Widia Oktarina	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	99	86,09	Mandiri
5	Arna Mela	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	78	67,83	Tidak Mandiri	
6	Riko Saputra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125	108,70	Mandiri	
7	Hengki Fernando	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	1	2	1	1	38	33,04	Tidak Mandiri
8	Lola Oktavia	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	99	86,09	Mandiri
9	Syaiful Anwar	3	3	3	3	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	102	88,70	Mandiri	
10	Dina Febiola	3	3	3	3	3	2	2	2	2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92	80,00	Tidak Mandiri	
11	Ilham Akmal	3	3	2	2	2	2	1	1	2	5	5	3	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	83	72,17	Tidak Mandiri	
12	Muhammad Fauzi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	119	103,48	Mandiri	
13	Diki Ariandi	3	3	3	3	3	2	2	2	2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	3	3	2	2	2	84	73,04	Mandiri	
14	Farhadyta Oliviandary	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	2	2	107	93,04	Mandiri	
15	Rara Sonia	3	3	2	2	1	1	1	1	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	73	63,48	Mandiri
16	Febrian Putra Ramadhan	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	1	3	2	2	3	3	55	47,83	Tidak Mandiri	
17	Riki Afriansah	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	54	46,96	Tidak Mandiri	
18	Neti Nurhayati	3	3	2	2	2	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	76	66,09	Tidak Mandiri	
19	Dedi Susanto	2	1	2	2	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	3	3	82	71,30	Tidak Mandiri	
20	Wiki	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	109	94,78	Mandiri	
21	Yuli Malinda	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	2	69	60,00	Tidak Mandiri	
22	Putri Irma Cahyani	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	103	89,57	Mandiri	
23	Hengki	2	2	2	1	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	2	2	80	69,57	Tidak Mandiri	

24	Muhammad Rayhan	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	64	55,65	Tidak Mandiri
25	Gilang Akmal Ramadhan	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	118	102,61	Mandiri
26	Reza Pahlevi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	119	103,48	Mandiri
27	Bestia Maulana	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	101	87,83	Mandiri
28	Mondriadi	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	118	102,61	Mandiri
29	Muhammad Alwani Fajri	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	73	63,48	Tidak Mandiri
30	Muhammad Ilham	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	4	4	1	4	3	4	4	99	86,09	Tidak Mandiri
31	Devi Putri Ayu	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	102	88,70	Mandiri
32	Aisyah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	3	5	4	5	5	5	4	4	113	98,26	Mandiri
33	Abdul Hafiz	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	3	2	2	4	3	2	2	2	1	1	46	40,00	Tidak Mandiri
34	Buyung Antoni Afrizalman	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	114	99,13	Mandiri
35	Marjeni	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	3	5	4	5	5	5	4	4	110	95,65	Mandiri
36	Nadia Gustiwulandari	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	73	63,48	Tidak Mandiri
37	Kania Busra Ningsih	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	73	63,48	Mandiri
38	Mhd. Rayhan	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	3	2	2	4	3	2	2	2	1	1	46	40,00	Tidak Mandiri
39	Nabilul Akram	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	118	102,61	Mandiri
40	Zikri Putra Pratama	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	74	64,35	Tidak Mandiri
41	Sri Ramadhani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	3	5	4	5	5	5	4	4	113	98,26	Mandiri
42	Berlian Friskana Mulya	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	2	2	69	60,00	Tidak Mandiri
43	Abel Saputra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	119	103,48	Mandiri
44	Elmi Yosa	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	73	63,48	Tidak Mandiri
45	Anggi Saputra	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	111	96,52	Mandiri
46	Desy Amelia	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	73	63,48	Mandiri
47	Ali Akbar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	123	106,96	Tidak Mandiri
48	Muhammad Farhan Hawari	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	3	1	2	36	31,30	Tidak Mandiri
49	Muhammad Fauzi Zahroni	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	73	63,48	Tidak Mandiri
50	Yuni Lestari	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	2	2	69	60,00	Tidak Mandiri
51	Yolanda Akhilla	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	111	96,52	Mandiri

52	Imelti Aisyah	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	90	78,26	Tidak Mandiri
53	Ririn Angelita	4	4	5	5	5	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	99	86,09	Tidak Mandiri	
54	Ish Mathul Iffah	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	73	63,48	Tidak Mandiri	
55	Gustia Intan Malini	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	123	106,96	Mandiri	
56	Fauzia Kamila	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	64	55,65	Tidak Mandiri	
57	Sarah Adha	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	121	105,22	Mandiri	
58	Mona	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	3	1	45	39,13	Tidak Mandiri	
59	M. Ulvi Sapriadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	2	75	65,22	Tidak Mandiri	
60	Siti Nabila Syafutri	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	73	63,48	Tidak Mandiri	
61	Anjelina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	2	75	65,22	Tidak Mandiri	
62	Afdahul Naufal Mukhlisin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	117	101,74	Mandiri	
63	Dela Guspita Sari	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	121	105,22	Mandiri	
64	Farel Risti Kurniawan	3	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	86	74,78	Tidak Mandiri	
65	Gilang Ramadhan	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	4	4	3	4	2	56	48,70	Tidak Mandiri	
66	Fani Ramadhani	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	4	4	3	3	86	74,78	Tidak Mandiri	
67	Zaza	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	35	30,43	Tidak Mandiri	
68	Rahmatullah Yunaldi	3	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	86	74,78	Tidak Mandiri	
69	Sukian Rahma Tika	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	77	66,96	Tidak Mandiri	
70	Dewa Riski	4	4	4	3	4	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	4	4	4	4	4	5	5	4	101	87,83	Mandiri	
71	Riski	4	4	4	3	4	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	4	4	4	4	4	5	5	4	101	87,83	Mandiri	
72	M. Iqbal Syabri	4	4	4	3	4	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	5	4	100	86,96	Mandiri	
73	Muhammad Irsyad Ramadhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	3	2	4	4	2	3	2	2	2	2	2	50	43,48	Tidak Mandiri	
74	Ida Fitra	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	120	104,35	Mandiri	
75	Auliana Selviano	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	122	106,09	Mandiri	
76	Muhammad Rizib	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	39	33,91	Tidak Mandiri	
77	Hafizatul Khairani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	122	106,09	Mandiri	
78	Tiara Agustina	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	113	98,26	Mandiri	
79	Silvi Oktarina	4	4	4	3	4	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	5	4	100	86,96	Mandiri	

80	Oki Fatoni	4	4	4	3	4	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	5	5	4	100	86,96	Mandiri		
81	Muhammad Fajri	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	100	86,96	Tidak Mandiri		
82	Aisyah Mardini	4	4	4	3	4	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	5	5	4	100	86,96	Tidak Mandiri		
83	Julizardi Herman	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	2	2	3	2	2	69	60,00	Mandiri	
84	Willy Giovani	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	94	81,74	Tidak Mandiri	
85	Rizki Foliandra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	3	5	4	4	83	72,17	Tidak Mandiri		
86	Silvia	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	113	98,26	Mandiri	
87	Rahmat	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	82	71,30	Tidak Mandiri		
88	Novia Eka Saputri	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	94	81,74	Tidak Mandiri	
89	Mayang Adira Kania	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	66	57,39	Tidak Mandiri		
90	Valerie Wahid	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	114	99,13	Mandiri	
91	Hidayatul Ratna Aulia	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	94	81,74	Mandiri	
92	Ismu Aldo Nugraha	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	4	3	4	3	62	53,91	Tidak Mandiri	
93	Cicil	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	94	81,74	Mandiri	
94	Ainin Shofia	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	114	99,13	Mandiri	
95	Khairil Insan Adha	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	66	57,39	Tidak Mandiri	
96	Teddy Nofri Yandi	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	4	3	4	3	62	53,91	Tidak Mandiri
97	Sinta Fatonah Lubis	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	121	105,22	Mandiri	
98	Apdan Maulana	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	94	81,74	Tidak Mandiri	
99	Saura	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	77	66,96	Tidak Mandiri	
100	Amelia Fitri	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	95	82,61	Mandiri	

Mandiri : 47 Orang
 Tidak Mandiri : 53 Orang
 Jumlah kelayan : 100 Orang

Kepala,
 Supandi, A.Ks
 NIP. 19720908 199903 1 004

3. UPTD PSKW ANDAM DEWI SOLOK

Rekapitulasi Skor Kemandirian

No	Nama	Skor Indikator (Banyak Urutan)						Jumlah	Skor Akhir	Mandiri/ Tdk Mandiri
		1	2	3	4	5	dst			
1	Giska Maycarli	0	0	2	1	9		67	89	Mandiri
2	Meisya Zazkia Azhari	0	1	0	0	14		72	96	Mandiri
3	Risa Wulandari	0	0	0	1	14		74	98	Mandiri
4	Ayu Depita Sari	0	0	1	2	12		71	94	Mandiri
5	Amanda Alfatonisa	0	0	1	4	10		69	92	Mandiri
6	Chintya Yulia dewi	0	0	1	3	11		70	93	Mandiri
7	Kansa Al Jannah	0	0	1	0	14		73	97	Mandiri
8	Hamidah Febriani	0	1	1	1	12		74	98	Mandiri
9	Sartika	0	1	0	4	9		63	84	Mandiri
10	Dewi	0	0	1	5	9		68	90	Mandiri
11	Nesya Febriani	0	1	0	0	14		73	97	Mandiri
12	Cania Permata Putri	2	3	0	1	7		47	62	Tidak Mandiri
13	Aulia Novia Wulandari	0	2	2	0	9		50	66	Tidak Mandiri
14	Rianti	2	1	3	2	7		56	74	Tidak Mandiri
15	Fadila Asrul	2	1	2	0	9		55	73	Tidak Mandiri
16	Septi Ayu Ambarwati	0	0	2	7	6		64	85	Mandiri
17	Maisarah	0	0	1	1	13		68	90	Mandiri
18	Rara Putri Marlina	0	0	0	3	15		72	96	Mandiri
19	Astrit Yuni Mariani	0	0	1	4	10		69	92	Mandiri
20	Nita Ofrita Yeni	0	0	8	2	5		57	76	Tidak Mandiri
21	Fauzia Haitul Hasanah	0	0	0	3	12		72	96	Mandiri
22	Nurul Safitri	0	0	0	2	13		73	97	Mandiri
23	Putri Salju	0	0	1	3	11		70	93	Mandiri
24	Moza Fitria Afizah	0	0	1	3	11		70	93	Mandiri
25	Nadia	0	0	0	2	13		73	97	Mandiri
26	Wahyu Nopitasari	0	0	2	4	9		67	89	Mandiri
27	Riska Yanti	0	0	0	1	14		64	85	Mandiri
28	Diana Lestari	0	0	1	2	12		71	94	Mandiri
29	Pika Aulia	0	0	3	2	10		67	89	Mandiri
30	Latifa	0	1	0	1	12		68	90	Mandiri
31	Natisya Afina	0	1	3	2	9		64	85	Mandiri
32	Gina Mardianti	0	0	0	2	13		73	97	Mandiri
33	Resa Ramanda	2	0	1	4	8		66	86	Mandiri
34	Riva Latifah	0	2	1	2	9		60	80	Mandiri
35	Zhafira Anjeli Cleo Putri	0	0	0	1	14		74	98	Mandiri
36	Laila Nis Furrahmah	0	0	0	4	11		71	94	Mandiri
37	Chamelia Yulvi Setiawati	0	0	1	3	11		70	93	Mandiri
38	Sabrina Khairun Nisa	0	1	1	3	10		67	89	Mandiri
39	Ririn Ramadhani	0	1	1	3	10		67	89	Mandiri
40	Rahmadahlia P	0	0	1	3	11		70	93	Mandiri
41	Nur Aisyah	0	0	2	3	10		68	90	Mandiri
42	Fanesa Saputri	0	1	2	1	11		67	89	Mandiri
43	Dinda Julia Putri	0	0	1	5	9		68	90	Mandiri
44	Yola Yolanda Sari	0	2	0	4	10		68	90	Mandiri
45	Giska Oktadecana	0	0	2	4	9		67	89	Mandiri
46	Mayfa Yandria Cahyani	0	0	2	4	9		67	89	Mandiri
47	Aira Maina Qulbi	0	0	2	4	9		67	89	Mandiri
48	Suzah Mei Olivia H	0	0	3	1	11		68	90	Mandiri
49	Asyifa Rahmadani Munandar	0	1	9	0	5		54	72	Tidak Mandiri
50	Annisa Luthfia	0	0	1	0	14		73	97	Mandiri



4. UPTD PSAABR BUDI UTAMA LUBUK ALUNG

**REKAPITULASI SKOR KEMANDIRIAN ANAK ASUH
UPTD PSAABR BUDI UTAMA LUBUK ALUNG TAHUN 2025**

No	Nama	Skor per indikator					Jumlah	Skor Akhir	Kategori
		1	2	3	4	5			
1	AFDAL				7	10	78	92	Mandiri
2	AHMAD RIZKI				14	3	71	84	Mandiri
3	NAZIB SIRITOITET			3	7	7	72	85	Mandiri
4	SYAHDU IMAM MAULANA				12	5	73	86	Mandiri
5	M. FADRI				9	8	76	89	Mandiri
6	NAJRIANTO				10	7	75	88	Mandiri
7	M. IKHSAN HAKIM				10	7	75	88	Mandiri
8	AHMAD MITRA			6	7	5	71	84	Mandiri
9	AL FAJAR			2	12	1	59	69	Tidak Mandiri
10	RINO				11	6	74	87	Mandiri
11	AIDIL				9	8	76	89	Mandiri
12	M. RAGIL				13	4	72	85	Mandiri
13	ALIM SURIADI			3	8	6	71	84	Mandiri
14	RADO APRIANTO			1	14	2	69	81	Mandiri
15	RAFATUL MUHAMMAD			4	6	6	66	78	Tidak Mandiri
16	TEGUH KURNIAWAN				12	5	73	86	Mandiri
17	PAHRI			17			51	60	Tidak Mandiri
18	RISMAL				10	7	75	88	Mandiri
19	MUSTOPA MAJID			7	10		61	72	Tidak Mandiri
20	PANJI PRASETYO			10	7		58	68	Tidak Mandiri
21	YUDI FEBRIAN			12	5		56	66	Tidak Mandiri
22	FIQRIO ARDIAN			10	6	1	59	69	Tidak Mandiri
23	FAREL MARCELINO				3	14	82	96	Mandiri
24	RIZKI KURNIA			2	8	7	73	86	Mandiri
25	RIDHO ALHAMDI MALIK				7	10	78	92	Mandiri
26	GIAN AKBAR				10	7	75	88	Mandiri
27	ALIF SYOFIANO			3	14		65	76	Tidak Mandiri
28	M. JIBRIL DAIMENA			1	9	7	74	87	Mandiri
29	FAHREL AKBAR			1	7	9	76	89	Mandiri
30	M. REKI NABIL SAPUTRA			10	5	2	60	71	Tidak Mandiri
31	M. RIZAL				9	8	76	89	Mandiri
32	ALI IMRAN		7	10			44	52	Tidak Mandiri
33	RINDI NOVAL			10	7		58	68	Tidak Mandiri
34	DAPA AULIA			9	8		59	69	Tidak Mandiri
35	ZHAKARIA S. BAITURRAHMAN			14	3		54	64	Tidak Mandiri
36	FAUZI ALAMSYAH			17			51	60	Tidak Mandiri
37	ALFIN JAYA PRATAMA		12	4		1	41	48	Tidak Mandiri
38	M. HENDRI				3	14	82	96	Mandiri
39	KHARIS IMRAN PRATAMA				10	7	75	88	Mandiri
40	OROHIM				5	12	80	94	Mandiri
41	ALKAUSAR ILMI			2	5	10	76	89	Mandiri
42	AGUNG WAJDI IKHLAS				14	3	71	84	Mandiri
43	KHOIRUL WILDAN KHAR				12	5	73	86	Mandiri
44	PAIS AR RAMA DANI			11	5	1	58	68	Tidak Mandiri
45	RANGGA HIKMAH				12	5	73	86	Mandiri
46	ILHAM SUSANDRA				9	8	76	89	Mandiri
47	RAHDIT TIYA JANUAR				10	7	75	88	Mandiri
48	PANDI AL BAIHAQI			11	6		57	67	Tidak Mandiri
49	JONATHAN ILVANO PUTRA		5	6	6		52	61	Tidak Mandiri
50	ABI HAMZAH HARAHAP			5	10	2	65	76	Tidak Mandiri
51	RIKI AUZAN			6	11		62	73	Tidak Mandiri

52	M. IRSAD FADIL ALFATIH			7	10		61	72	Tidak Mandiri
53	NEFIL POGGINO		2	11	4		53	62	Tidak Mandiri
54	M. RIDOWAN P. ANUGRAH		3	10	4		52	61	Tidak Mandiri
55	M. FADHIL HIDAYAT			7	10		61	72	Tidak Mandiri
56	ARUHUL AMIN			1	13	3	70	82	Mandiri
57	IYAR ROBBAL ALAMIN				11	6	74	87	Mandiri
58	ARYA PAHRI		7	8	2		46	54	Tidak Mandiri
59	M. ALI GIBRAN		1	6	10		60	71	Tidak Mandiri
60	M. ALGHANIY		7	10			44	52	Tidak Mandiri
61	ANUGRAH FEBRIAN			12	5		56	66	Tidak Mandiri
62	PRADANA AGUSTIN			11	6		57	67	Tidak Mandiri
63	AFDAL ZIKRI			12	5		56	66	Tidak Mandiri
64	TRISANLONG		2	10	5		54	64	Tidak Mandiri
65	WAHYU ADITYA RAHMAN		4	13			47	55	Tidak Mandiri
66	ABDULLAH MIFTAHUL FALAH			3	5	9	74	87	Mandiri
67	ADAM RASYID		6	11			45	53	Tidak Mandiri
68	HENGKI SYAFPUTRA		10	7			41	48	Tidak Mandiri
69	RIZKI HAMDA PUTRA			3	10	4	69	81	Mandiri
70	ISHAK TULKABAH				11	6	74	87	Mandiri
71	FATHUR RAZAQ			10	7		58	68	Tidak Mandiri
72	FADLI APRIANTO			11	5	1	58	68	Tidak Mandiri
73	ILHAM FAHRI			6	11		62	73	Tidak Mandiri
74	ROKIB BIL VIKRI			10	7		58	68	Tidak Mandiri
75	AFKAR HANIF MUFLI				13	4	72	85	Mandiri

Keterangan :

Mandiri : 37 orang

Tidak Mandiri : 38 orang

Lubuk Alung, 01 Desember 2025
Kepala UPTB

ISKANDAR, S.Pd
NIP. 197007121993031007

**REKAPITULASI SKOR KEMANDIRIAN ANAK ASUH
UPTD PSAABR BUDI UTAMA LUBUK ALUNG TAHUN 2025**

No	Nama	Skor per indikator					Jumlah	Skor Akhir	Kategori
		1	2	3	4	5			
1	AFDAL				7	10	78	92	Mandiri
2	AHMAD RIZKI				14	3	71	84	Mandiri
3	NAZIB SIRITOITET			3	7	7	72	85	Mandiri
4	SYAHDU IMAM MAULANA				12	5	73	86	Mandiri
5	M. FADRI				9	8	76	89	Mandiri
6	NAJRIANTO				10	7	75	88	Mandiri
7	M. IKHSAN HAKIM				10	7	75	88	Mandiri
8	AHMAD MITRA			6	7	5	71	84	Mandiri
9	AL FAJAR			2	12	1	59	69	Tidak Mandiri
10	RINO				11	6	74	87	Mandiri
11	AIDIL				9	8	76	89	Mandiri
12	M. RAGIL				13	4	72	85	Mandiri
13	ALIM SURIADI			3	8	6	71	84	Mandiri
14	RADO APRIANTO			1	14	2	69	81	Mandiri
15	RAFATUL MUHAMMAD			4	6	6	66	78	Tidak Mandiri
16	TEGUH KURNIAWAN				12	5	73	86	Mandiri
17	PAHRI			17			51	60	Tidak Mandiri
18	RISMAL				10	7	75	88	Mandiri
19	MUSTOPA MAJID			7	10		61	72	Tidak Mandiri
20	PANJI PRASETYO			10	7		58	68	Tidak Mandiri
21	YUDI FEBRIAN			12	5		56	66	Tidak Mandiri
22	FIQRIO ARDIAN			10	6	1	59	69	Tidak Mandiri
23	FAREL MARCELINO				3	14	82	96	Mandiri
24	RIZKI KURNIA			2	8	7	73	86	Mandiri
25	RIDHO ALHAMDI MALIK				7	10	78	92	Mandiri
26	GIAN AKBAR				10	7	75	88	Mandiri
27	ALIF SYOFIANO			3	14		65	76	Tidak Mandiri
28	M. JIBRIL DAIMENA			1	9	7	74	87	Mandiri
29	FAHREL AKBAR			1	7	9	76	89	Mandiri
30	M. REKI NABIL SAPUTRA			10	5	2	60	71	Tidak Mandiri
31	M. RIZAL				9	8	76	89	Mandiri
32	ALI IMRAN		7	10			44	52	Tidak Mandiri
33	RINDI NOVAL			10	7		58	68	Tidak Mandiri
34	DAPA AULIA			9	8		59	69	Tidak Mandiri
35	ZHAKARIA S. BAITURRAHMAN			14	3		54	64	Tidak Mandiri
36	FAUZI ALAMSYAH			17			51	60	Tidak Mandiri
37	ALFIN JAYA PRATAMA		12	4		1	41	48	Tidak Mandiri
38	M. HENDRI				3	14	82	96	Mandiri
39	KHARIS IMRAN PRATAMA				10	7	75	88	Mandiri
40	OROHIM				5	12	80	94	Mandiri
41	ALKAUSAR ILMI			2	5	10	76	89	Mandiri
42	AGUNG WAJDI IKHLAS				14	3	71	84	Mandiri
43	KHOIRUL WILDAN KHAR				12	5	73	86	Mandiri
44	PAIS AR RAMA DANI			11	5	1	58	68	Tidak Mandiri
45	RANGGA HIKMAH				12	5	73	86	Mandiri
46	ILHAM SUSANDRA				9	8	76	89	Mandiri
47	RAHDIT TIYA JANUAR				10	7	75	88	Mandiri
48	PANDI AL BAIHAQI			11	6		57	67	Tidak Mandiri
49	JONATHAN ILVANO PUTRA		5	6	6		52	61	Tidak Mandiri
50	ABI HAMZAH HARAHAHAP			5	10	2	65	76	Tidak Mandiri
51	RIKI AUZAN			6	11		62	73	Tidak Mandiri

53	Muhammad Riziq				11	5	69	81	Mandiri
54	Adri Kamsan		2	1	6	7	66	78	Tidak Mandiri
55	Refan			1	5	10	73	86	Mandiri
56	Rendika Eldira				10	6	70	82	Mandiri
57	Andre Saputra			2	7	7	69	81	Mandiri
58	Dion Ridwan Fajra		1	1	7	7	68	80	Mandiri
59	Aditya Pratama			6	5	5	63	74	Tidak Mandiri
60	Zul Hamuddin			1	10	5	68	80	Mandiri
61	Evanda Lukman		2	1	3	10	69	81	Mandiri
62	Atdiansyah			1	5	10	73	86	Mandiri
63	Alju Aprinal				15	1	65	76	Tidak Mandiri
64	Andava Alfajrian		2		6	8	68	80	Mandiri
65	Muhammad Frizan			1	10	5	68	80	Mandiri

Keterangan :

Mandiri : 49 orang

Tidak Mandiri : 16 orang

Lubuk Alung, 01 Desember 2025

Kepala UPTD



ISKANDAR, S.Pd

NIP. 19700712-199303 1 007

**REKAPITULASI SKOR KEMANDIRIAN KELAYAN KETERAMPILAN
UPTD PSAABR BUDI UTAMA LUBUK ALUNG TAHUN 2025**

No	Nama	Skor per indikator					Jumlah	Skor Akhir	Kategori
		1	2	3	4	5			
1	Dirli Adito				6	10	74	87	Mandiri
2	Rizky Rahmat Fadill				11	5	69	81	Mandiri
3	Tomi Syahanggara			2	4	10	72	85	Mandiri
4	Muhamad Ardi			5	4	7	66	78	Tidak Mandiri
5	Irwansah				10	6	70	82	Mandiri
6	Muhammad Syauky Nur Khalik			2	6	8	70	82	Mandiri
7	Sugriwa Sundapa			5	2	9	68	80	Mandiri
8	Qaf Purqon		2	1	13		59	69	Tidak Mandiri
9	Almu Tapri				11	5	69	81	Mandiri
10	Muhammad Ali Furqon			3	10	3	64	75	Tidak Mandiri
11	Rafi Ahmad Kazim		2		1	13	73	86	Mandiri
12	Muhammad Fadhil				16		64	75	Tidak Mandiri
13	Muhammad Ilham			4	12		60	71	Tidak Mandiri
14	Kurniawan		2		6	8	68	80	Mandiri
15	Aidil				9	7	71	84	Mandiri
16	Yusuf Hidayatullah			1	5	10	73	86	Mandiri
17	Afli Rezendi				10	6	70	82	Mandiri
18	Nanang Kurniawan			2	7	7	69	81	Mandiri
19	Rinaldi Fauzi		1	1	7	7	68	80	Mandiri
20	Riandi Afdillah			6	5	5	63	74	Tidak Mandiri
21	Egi Saputra			1	10	5	68	80	Mandiri
22	Muhammad Thabrani		2	1	3	10	69	81	Mandiri
23	Hazel Rafi Syadid			1	5	10	73	86	Mandiri
24	Muhammad Alfarizi				15	1	65	76	Tidak Mandiri
25	Rendi Andesta		2		6	8	68	80	Mandiri
26	Matra Epandri				9	7	71	84	Mandiri
27	Zidan Jumeico Putra			1	5	10	73	86	Mandiri
28	Zulhaidi				10	6	70	82	Mandiri
29	Syaifullah Yusuf			1	10	5	68	80	Mandiri
30	Rafi Abyyyu Alzaki			3	10	3	64	75	Tidak Mandiri
31	Muhammad Alfarizi		2	1	6	7	66	78	Tidak Mandiri
32	Rahmad Fauzan				6	10	74	87	Mandiri
33	Akbar Mufriansyah				11	5	69	81	Mandiri
34	Rahmad Maulana			2	4	10	72	85	Mandiri
35	Taufiq Kurniawan			5	4	7	66	78	Tidak Mandiri
36	Yuhandi Nata				10	6	70	82	Mandiri
37	Nazril Ilham			2	6	8	70	82	Mandiri
38	Setia Bakti			5	2	9	68	80	Mandiri
39	Aditya Julianto		2	3	5	6	63	74	Tidak Mandiri
40	Agri Wandí			1	5	10	73	86	Mandiri
41	Hasannudin		2	5	7	2	57	67	Tidak Mandiri
42	Ismu Azhi Almi			2	2	12	74	87	Mandiri
43	M. Reihan			1	5	10	73	86	Mandiri
44	M. Akbar		2		3	11	71	84	Mandiri
45	Hengki Effendi			3	10	3	64	75	Tidak Mandiri
46	Axel Roenda Pratama			2	7	7	69	81	Mandiri
47	Abdul Fahmi		1	1	7	7	68	80	Mandiri
48	Muhammad Ihsan		2		6	8	68	80	Mandiri
49	Muhamad Dedek Kurniawan				9	7	71	84	Mandiri
50	Pryyoga Subianto			1	5	10	73	86	Mandiri
51	Al Hadid Geovani				10	6	70	82	Mandiri
52	Yandri Aditya Putra				6	10	74	87	Mandiri

53	Roja Anggara				11	5	69	81	Mandiri
54	Radit Prayudha		2	1	6	7	66	78	Tidak Mandiri
55	Aditya Renaldo Putra				6	10	74	87	Mandiri
56	Fajar Irsandi				11	5	69	81	Mandiri
57	Ahmad Rafli Fadhillah		2		6	8	68	80	Mandiri
58	Irfan Ramadhan				9	7	71	84	Mandiri
59	Annas			1	5	10	73	86	Mandiri
60	Apletto Ravino				10	6	70	82	Mandiri
61	Muhammad Sabri				7	9	73	86	Mandiri
62	M. Abdul Aziz		2		5	9	69	81	Mandiri
63	Yoga Yahya Andika			3	10	3	64	75	Tidak Mandiri
64	Fajri Mubarak			2	2	12	74	87	Mandiri
65	Defran Blazio Yofiandra			1	10	5	68	80	Mandiri
66	Juli Yanto			3	10	3	64	75	Tidak Mandiri
67	M. Rijalallah			6	5	5	63	74	Tidak Mandiri
68	Muhammad Riyadhil Fauzi		2	1	6	7	66	78	Tidak Mandiri
69	Alhagil Saputra				6	10	74	87	Mandiri
70	Yuril Khadafi				11	5	69	81	Mandiri
71	Daviq Taufandi			2	4	10	72	85	Mandiri
72	Muhammad Tamil			5	4	7	66	78	Tidak Mandiri
73	Alan Afriyansah				10	6	70	82	Mandiri
74	Anta Salim			2	6	8	70	82	Mandiri
75	Rais Gusti			5	2	9	68	80	Mandiri
76	Andra Amalo				6	10	74	87	Mandiri
77	Muhammad Fadjri Ramadhan			3	10	3	64	75	Tidak Mandiri
78	Dicky Adi Pratama		2		10	4	64	75	Tidak Mandiri
79	Aidil Agustin			1	5	10	73	86	Mandiri
80	Dillan Akbar			1	10	5	68	80	Mandiri

Keterangan :

Mandiri : 59 orang

Tidak Mandiri : 21 orang



5. UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG

REKAPITULASI SKOR KEMANDIRIAN UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG

No	Nama	Skor Indikator																		Jumlah	Skor Akhir	Mandiri/ Tidak Mandiri	Jenis Kelamin
		Pengetahuan						Sikap								Keterampilan							
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3					
1	Sovia Febrianita	5	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	3	2	3	3	4	3	62	72,94117647	Tidak Mandiri	Perempuan	
2	Akeisya Madeva	5	5	4	5	3	5	5	4	3	2	4	5	4	4	5	5	3	71	83,52941176	Mandiri	Perempuan	
3	Intan Permata Dewi	4	3	5	2	4	3	5	4	3	2	3	2	3	4	4	3	5	59	69,41176471	Tidak Mandiri	Perempuan	
4	Seruny Aruka Nachyaniago	5	4	4	3	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	77	90,58823529	Mandiri	Perempuan	
5	Simfoni Febrianti	4	3	5	3	4	4	1	2	4	2	4	2	2	2	2	3	3	50	58,82352941	Mandiri	Perempuan	
6	Aisyah Ramadani	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan	
7	Citra Wulandari	5	4	5	5	3	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	79	92,94117647	Mandiri	Perempuan	
8	Velma Effie Putri	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan	
9	Alisha Mayendra Putri	5	4	4	5	4	5	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	69	81,17647059	Mandiri	Perempuan	
10	Nike Mayang Permatasari	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	73	85,88235294	Mandiri	Perempuan	
11	Melisa Lase	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	5	4	4	4	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan	
12	Sulistiyowati	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan	
13	Arini	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	77	90,58823529	Mandiri	Perempuan	
14	Herra Supriani	3	3	2	3	3	3	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	34	40	Tidak Mandiri	Perempuan	
15	Difa Shahratul Aini	4	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	4	2	51	60	Tidak Mandiri	Perempuan	
16	Oktaviona Risa	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	73	85,88235294	Mandiri	Perempuan	
17	Jihan Cleo Patra	4	5	4	3	2	3	1	2	1	4	1	3	3	1	1	1	1	40	47,05902353	Tidak Mandiri	Perempuan	
18	Ria Amelia	5	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	3	3	5	3	5	3	70	82,35294118	Mandiri	Perempuan	
19	Qory Khairunnisa	4	5	4	4	5	3	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	70	82,35294118	Mandiri	Perempuan	
20	Mutiara Dasni	2	4	3	4	3	3	5	4	3	4	3	2	3	5	3	4	2	57	67,05882353	Tidak Mandiri	Perempuan	
21	Aira Saputri	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	82	96,47058824	Mandiri	Perempuan	
22	Selva Gania	4	3	3	4	4	4	5	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	60	81,17647059	Mandiri	Perempuan	
23	Adelia Syafira	4	4	2	5	4	4	5	3	2	4	5	1	3	5	4	5	5	65	76,47058824	Tidak Mandiri	Perempuan	
24	Melsi Cantika	3	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	70	82,35294118	Mandiri	Perempuan	
25	Nur Habibah	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	74	87,05882353	Mandiri	Perempuan	
26	Siti Nurul Azizah	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan	
27	Hanifah Khainunnisa	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	77	90,59023529	Mandiri	Perempuan	
28	Fitri Hadiah	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan	
29	Zahratul Jannah	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	80	94,11764706	Mandiri	Perempuan	
30	Liza Diandra	5	4	3	4	4	3	5	4	5	5	5	3	3	3	4	3	3	66	77,64705882	Tidak Mandiri	Perempuan	
31	Zahira Fitriani	5	4	5	4	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan	
32	Dinda Pebriani	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	67	78,82352941	Tidak Mandiri	Perempuan	

33	Nurul Asyiqin	4	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	73	85,88235294	Mandiri	Perempuan
34	Arianti Nabila	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	67	79,82362941	Tidak Mandiri	Perempuan
35	Trisna Rahmawati	5	3	5	3	3	4	4	3	4	5	4	4	5	3	5	4	5	69	81,17647059	Mandiri	Perempuan
36	Aprina Yanti	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	2	4	3	3	3	52	61,17647059	Tidak Mandiri	Perempuan
37	Fadhila Amelia	5	3	5	3	3	4	5	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	73	85,88235294	Mandiri	Perempuan
38	Syaira Agustin	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	65	76,47058824	Tidak Mandiri	Perempuan
39	Angelina Joanka	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	5	5	5	77	90,58823529	Mandiri	Perempuan
40	Nabila Masiyoh Sakhi	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	68	80	Tidak Mandiri	Perempuan
41	Fira Lestari	5	4	4	4	5	3	5	5	5	5	5	4	3	4	5	5	4	75	88,23529412	Mandiri	Perempuan
42	Iffaturahmi	3	4	3	5	5	4	5	4	5	5	4	2	3	4	4	4	4	68	80	Tidak Mandiri	Perempuan
43	Sohla Keysa	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	81	95,29411765	Mandiri	Perempuan
44	Alifah Zaliana	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	81	95,29411765	Mandiri	Perempuan
45	Oktavioni Putri	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan
46	Eoa Yustia Zammi	3	3	2	4	3	2	5	4	4	4	4	3	3	5	4	3	4	60	70,58823529	Tidak Mandiri	Perempuan
47	Rinjani Sildiva	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	79	92,94117647	Mandiri	Perempuan
48	Diana Pertiwi	4	4	3	4	3	4	5	5	4	4	5	3	3	5	4	5	4	69	81,17647059	Mandiri	Perempuan
49	Zikni Aulia Zahra	4	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	72	84,70588235	Mandiri	Perempuan
50	Husnul Hatimah	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	81	95,29411765	Mandiri	Perempuan
51	Nabila Conra	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	75	88,23529412	Mandiri	Perempuan
52	Syifa Listi Aulia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	85	100	Mandiri	Perempuan
53	Nurul Azizah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	3	3	3	51	60	Tidak Mandiri	Perempuan
54	Asy/Syifa Zahratul Aulia	3	3	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	73	85,88235294	Mandiri	Perempuan
55	Nariza Rahma Dani	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	3	3	72	84,70588235	Mandiri	Perempuan
56	Rizka Putri Zahara	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	74	87,05882353	Mandiri	Perempuan
57	Fauziah Mahfudhah	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	70	82,35294118	Mandiri	Perempuan
58	Nuzula Revana Islami	4	5	3	5	3	4	5	4	5	5	5	4	3	5	4	5	4	73	85,88235294	Mandiri	Perempuan
59	Azizah Putri Yasmi	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	83	97,64705882	Mandiri	Perempuan
60	Siti Aisyah	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan
61	Zaskia Puspita Meoca	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	3	61	71,76470588	Tidak Mandiri	Perempuan
62	Fitri	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	3	3	5	5	3	4	69	81,17647059	Mandiri	Perempuan
63	Zahratul Afiza	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	74	87,05882353	Mandiri	Perempuan
64	Cahaya Jufri Kasih	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	74	87,05882353	Mandiri	Perempuan
65	Olivia Anjelisa	4	5	4	3	4	4	5	5	5	5	3	3	3	5	4	4	4	70	82,35294118	Mandiri	Perempuan
66	Fifnatul Puja	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	79	92,94117647	Mandiri	Perempuan
67	Viona Andara	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	4	79	92,94117647	Mandiri	Perempuan
68	Febriani Pariska	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	75	88,23529412	Mandiri	Perempuan
69	Rafqi Maisyarah	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	61	71,76470588	Tidak Mandiri	Perempuan
70	Zulmaida Sri Mutia	3	3	3	4	4	3	5	5	4	5	4	3	3	4	2	4	3	62	72,94117647	Tidak Mandiri	Perempuan

71	Sudi Rahayu	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan
72	Verawati Saogo	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	75	86,23529412	Mandiri	Perempuan
73	Karina Khairunnisa	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	4	4	5	79	92,94117647	Mandiri	Perempuan
74	Lola Cahyani	5	3	5	5	3	3	5	5	5	4	3	3	4	5	3	3	4	68	80	Tidak Mandiri	Perempuan
75	Muflihatul Zakyah Ramadhani	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	3	4	5	4	4	5	74	87,05882353	Mandiri	Perempuan
76	Nabila Puja Deantri	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	4	77	90,58823529	Mandiri	Perempuan
77	Mardiah	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan
78	Azka Ardyansyah Putri	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	1	2	4	4	4	60	70,58823529	Tidak Mandiri	Perempuan
79	Relana Dwi Anjani	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	44	51,76470588	Tidak Mandiri	Perempuan
80	Yuni Permata Sari	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	84	98,82352941	Mandiri	Perempuan
81	Selvi Ayu Andira	3	3	3	4	4	3	5	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	61	71,76470588	Tidak Mandiri	Perempuan
82	Indah Kawil Asni	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	73	85,88235294	Mandiri	Perempuan
83	Zakia Gustina Putri	4	3	3	4	4	5	5	4	3	3	3	3	3	5	4	4	3	63	74,11764706	Tidak Mandiri	Perempuan
84	Arese Putri Aulia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	64	90,02352941	Mandiri	Perempuan
85	Ayu Septiani	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan
86	Mardia	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	4	2	3	1	30	35,29411765	Tidak Mandiri	Perempuan
87	Siti Maysarah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	82	96,47058824	Mandiri	Perempuan
88	Rabiatulad'iyah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	83	97,64705882	Mandiri	Perempuan
89	Depita Sari	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	3	4	5	4	5	4	74	87,05882353	Mandiri	Perempuan
90	Azizah	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	79	92,94117647	Mandiri	Perempuan
91	Rayssa Aprilia	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan
92	Nazwa Ahdadul Putri	5	3	2	4	1	2	5	4	3	2	4	3	2	2	3	2	3	50	58,82352941	Tidak Mandiri	Perempuan
93	Chelsi Anieldi	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	81	Mandiri	Tidak Mandiri	Perempuan
94	Salsanabila Putri	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan
95	Silva Helma Liyaa	5	5	4	4	5	3	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	76	89,41176471	Mandiri	Perempuan
96	Naura Seplya Putri Radinta	5	4	5	5	3	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	79	92,94117647	Mandiri	Perempuan
97	Meisya Putri	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	81	95,29411765	Mandiri	Perempuan
98	Delvi Mami	3	4	3	3	3	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	66	77,64705882	Tidak Mandiri	Perempuan
99	Sirta Norita	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	78	91,76470588	Mandiri	Perempuan
100	Zelfine Putri	4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	3	4	4	4	5	3	70	82,35294118	Mandiri	Perempuan

Mandiri : 72 Orang
Tidak Mandiri : 28 Orang
Jumlah kelayan : 100 Orang

Perempuan : 100 anak

Mengetahui,
Kepala UPTD PSAA Tr Murni Padang Panjang


Emal, S.T., MM
NIP. 19720525 199203 1 006

6. UPTD PSBR HARAPAN PADANG PANJANG

Rekapitulasi Skor Kemandirian Kelayan PSBR Harapan Angkatan I Tahun 2025

No	Nama	Skor Indikator (Banyak Uraian)																Jumlah	Skor Akhir	Mandiri/ Tdk Mandiri
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	AFISAH RAHMADINA	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	75	93,75	Mandiri
2	AIDA FITRIA SILPANI	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	97,5	Mandiri
3	ANNISA DEPANIA PUTRI	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	77	96,25	Mandiri
4	CHELSY	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	77	96,25	Mandiri
5	DAHLIA PRASTIKA	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	76	95	Mandiri
6	DELLA SAPUTRI	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	77	96,25	Mandiri
7	DEVI SAFITRI	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	75	93,75	Mandiri
8	DIVIA NADIRA PUTRI	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	3	5	5	4	5	5	73	91,25	Mandiri
9	DOLA SAPUTRI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	77	96,25	Mandiri
10	FIFNATUL PUJA	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	70	87,5	Mandiri
11	HANIARTI EMILA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	76	95	Mandiri
12	HASNATUL MARDIAH	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	66	81,25	Mandiri
13	MASYITOH NASUTION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	78	97,5	Mandiri
14	NADA SARI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	79	98,75	Mandiri
15	NADIA TUL HALIMAH	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	78	97,5	Mandiri
16	NAJMI AZWILA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	78	97,5	Mandiri
17	NINA LESTARI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	78	97,5	Mandiri
18	NOVA SARI	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	77	96,25	Mandiri
19	NOPIA RAMADHANI	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	75	93,75	Mandiri
20	NURHALIMAH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	78	97,5	Mandiri
21	NURI ASNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	79	98,75	Mandiri
22	NURUL FAUZANA	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	78	97,5	Mandiri
23	SUCI RAMADANI	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	76	95	Mandiri
24	TEGIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	77	96,25	Mandiri
25	ZAHRAH MAWADDAH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	79	98,75	Mandiri
26	AULIA	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	75	93,75	Mandiri
27	DEWITA SUSANTI	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	3	4	70	87,5	Mandiri
28	FENNY GUSTIARIZA	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	74	92,5	Mandiri
29	HAFIFAH FAUZIAH	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	74	92,5	Mandiri
30	HAYATUN NISA	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	73	91,25	Mandiri
31	HILDA HIDAYATI	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	77	96,25	Mandiri
32	MAULIDIA PUTRI	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	72	90	Mandiri
33	MUHANNI	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	77	96,25	Mandiri
34	MUYANA	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	74	92,5	Mandiri
35	NUR FADILAH	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	74	92,5	Mandiri
36	NUR HASANAH	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	75	93,75	Mandiri
37	RAFI INDAH	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	74	92,5	Mandiri
38	AFRISA AMELIA	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	76	93,75	Mandiri
39	ADINDA MAHARANI	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	75	93,75	Mandiri
40	DEA SAHIRI	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	72	90	Mandiri
41	FITRIA NABILA	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	72	90	Mandiri
42	SYALWA RAMADHANI	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	75	93,75	Mandiri
43	LIDIA PANESA	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	74	92,5	Mandiri
44	ZAHARA	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	73	91,25	Mandiri
45	WIDYA PUTRI	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	72	90	Mandiri
46	SELVI ANIDA	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	74	92,5	Mandiri

47	SERLY GUSNAYANTI	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	78	97,5	Mandiri
48	RISKA RESKINAH	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	76	95	Mandiri
49	NURISTINA	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	75	93,75	Mandiri
50	NUR SANIAH	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	74	92,5	Mandiri	
51	NADIA ULFA	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	72	90	Mandiri	
52	AFNI AULIA	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	74	92,5	Mandiri	
53	CINDY PUTRI SYUNATA	4	4	3	3	5	4	4	5	4	5	5	4	4	3	5	3	3	66	81,25	Mandiri	
54	FATIATUL RUSDA	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	3	64	80	Mandiri	
55	META	4	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	59	73,75	Tidak Mandiri	
56	NAILA VAMELA	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	71	88,75	Mandiri		
57	NELIA	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	66	82,5	Mandiri	
58	OCHA LUTFIAH	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	65	81,25	Mandiri	
59	RENATA FASHIAH NABIL	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri	
60	RIFA ANJELI	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	64	80	Mandiri	
61	SUCI AMANDA	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	77	96,25	Mandiri	
62	ANGGUN RAUDATUL JANNAH	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	64	80	Mandiri	
63	APRILIA NITA	4	3	3	3	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	57	71,25	Tidak Mandiri	
64	DARATHUL ANI	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	71	88,75	Mandiri	
65	DHEA ANTIKA PUTRI	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri	
66	FIONA	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	81,25	Mandiri	
67	FITRIA AZMAR	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	71	88,75	Mandiri	
68	LAILAN NAJMI	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	85	Mandiri	
69	LAYLA PUTRI SYAQBANIA	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67	83,75	Mandiri	
70	META TRI APRIZA	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	72	90	Mandiri	
71	MONICA ARDELIA	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	68	85	Mandiri	
72	NABILA SAFIRA	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	81,25	Mandiri	
73	NISA ULHUSNA LUBIS	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	81,25	Mandiri	
74	PUTRI PAKIS	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	64	80	Mandiri	
75	RISNAWATI	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	67	83,75	Mandiri	
76	RONA RIZKI ALIZA	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	69	86,25	Mandiri	
77	SALSABILA FIRDAUS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	66	82,5	Mandiri	
78	SEPTIA NUR RAHMADANI	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	69	86,25	Mandiri	
79	SITI HALIMAH	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	55	68,75	Tidak Mandiri	
80	SOHLA KEYSA	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri	
81	SRI AULIA	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	81,25	Mandiri	
82	SYAHARA JULIA SAKINAH	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	68	85	Mandiri	
83	VEER ZHARA	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	66	82,5	Mandiri	
84	VIOLA AMANDA	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	4	3	3	61	76,25	Tidak Mandiri	

Kelayan Mandiri : 80 Orang
Kelayan Tidak Mandiri : 4 orang



Rekapitulasi Skor Kemandirian Kelayan PSBR Harapan Angkatan II Tahun 2025

No	Nama	Skor Indikator (Banyak Urutan)																Jumlah	Skor Akhir	Mandiri/ Tdk Mandiri
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	AHDAYANI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	78	97,5	Mandiri
2	AYU SRI NINGSIH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	78	97,5	Mandiri
3	AZIZAH RAHMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	76	95	Mandiri
4	FAUZIAH LATIF	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	79	98,75	Mandiri
5	HILMA AKYUNINA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	77	96,25	Mandiri
6	IJA MUHAJJAH	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	76	95	Mandiri
7	INTAN MUTIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	77	96,25	Mandiri
8	MELISA KURNIAWATI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	78	97,5	Mandiri
9	MISKA IDAH	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	97,5	Mandiri
10	MUZDALIFAH	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	78	97,5	Mandiri
11	NAZILATUL KHAYRAT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	79	98,75	Mandiri
12	NENDEN AQILA EM	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	76	95	Mandiri
13	NEZILA PUTRI SALMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	79	98,75	Mandiri
14	NINDI APRILIA RAHAYU	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	78	97,5	Mandiri
15	NUR SAIDAH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	78	97,5	Mandiri
16	NURMAISYA THREE	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	75	93,75	Mandiri
17	SALSABILA AZ ZAHRA	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	77	96,25	Mandiri
18	SALWA SAHRO	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	76	95	Mandiri
19	SENI ALIFYA	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	66	82,5	Mandiri
20	TATIANI	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	77	96,25	Mandiri
21	VIOLA DWI CHANDRA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	78	97,5	Mandiri
22	WAHYUNI	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	76	95	Mandiri
23	WARHAMNA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	78	97,5	Mandiri
24	WIDYA PUTRI	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	75	93,75	Mandiri
25	YUPITA SARI	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	76	95	Mandiri
26	AURA MITHA ISTIQOMAH	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	66	82,5	Mandiri
27	AYSAH	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	72	90	Mandiri
28	DELVI GUSRIANI	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	69	86,25	Mandiri
29	DZIKRA ISNAINI A	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	71	88,75	Mandiri
30	EMIA REZA	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	65	81,25	Mandiri
31	FADHILLA TRI SUCI LUBIS	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	71	88,75	Mandiri
32	FARA DILLA AZNI	4	4	2	2	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	64	80	Mandiri
33	GEA AFRILIA PUTRI	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	67	83,75	Mandiri
34	HAFIZA ROSYIDA	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3	1	50	62,5	Tidak Mandiri
35	INDAH RIZKI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	Mandiri
36	KARTINI	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	68	85	Mandiri
37	LIA NUR MAYA	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	66	82,5	Mandiri
38	MARYAM SIREGAR	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	75	93,75	Mandiri
39	NUR AMELIA	4	5	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	67	83,75	Mandiri
40	PUTRI FEBRIDA	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	68	85	Mandiri
41	REFFYNA	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	74	92,5	Mandiri
42	RIRIN DEWI ARIYANTI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	Mandiri
43	SAFRINA YANI	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	72	90	Mandiri
44	SALMA ZAHIRA	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	69	86,25	Mandiri

45	SITI FATIMAH	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	69	86,25	Mandiri
46	SRI FADILAH	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	69	86,25	Mandiri
47	WIDIA HENNI	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	72	90	Mandiri
48	WULAN NOPBARA	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	68	85	Mandiri
49	ZAHRA KHOLILA	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	71	88,75	Mandiri
50	ZAKIYAH	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	66	82,5	Mandiri
51	AIDIL FITRIA	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	66	82,5	Mandiri
52	AILA ASYURA	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	65	81,25	Mandiri
53	ARINI IHSAN	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	68	85	Mandiri
54	DARMAITA	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	55	68,75	Tidak Mandiri
55	ENDAH RAHAYU	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	64	80	Mandiri
56	FLORIZNA KHAM SATUL A	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	68	85	Mandiri
57	GHIZKA APRIA NINGSIH	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4		57	71,25	Tidak Mandiri
58	HUSHNIL KHOTIMAH	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	5	4	64	80	Mandiri
59	MAMUNAH	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	77	96,25	Mandiri
60	MASRIPA	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	79	98,75	Mandiri
61	NIA HERMIYANTI	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	63	78,75	Tidak Mandiri
62	NOVITA SARI	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	55	68,75	Tidak Mandiri
63	NUR ASYIFA	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	68	85	Mandiri
64	NUR LAILIS	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	81,25	Mandiri
65	PENTI NUR AFIANI	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	65	81,25	Mandiri
66	PUTRI AGUSTI	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	66	82,5	Mandiri
67	REVA LINA	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	68	85	Mandiri
68	SALSABILA AZ ZAHRI	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	76	95	Mandiri
69	SALWA NADYA PUTRI	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	74	92,5	Mandiri
70	SILVA SAPUTRI	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	82,5	Mandiri
71	SITI KHODIAH	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	81,25	Mandiri
72	SYIFA FADILAH	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	70	87,5	Mandiri
73	YUSNIMAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	76,25	Tidak Mandiri
74	ZARA AFRIANI	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	68	85	Mandiri
75	ZIFAHUL HUSNA	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	69	86,25	Mandiri
76	ADELA APRILIA PUTRI	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri
77	ALYA NURSYAFA	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	3	4	4	4	70	87,5	Mandiri
78	ANGGI FADHILAH NAULI	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	68	85	Mandiri
79	ANNISA PUTRI RAHAYU	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	73	91,25	Mandiri
80	CAHAYU MUTIARA	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	69	86,25	Mandiri
81	DESRI WULANDARI	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	72	90	Mandiri
82	DIAN AFRIYANTI	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	73	91,25	Mandiri
83	DINA DWI NOVITA	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri
84	DWIFA	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	82,5	Mandiri
85	ELSA FEBRIANTI	4	3	3	3	5	5	4	5	4	4	5	3	3	3	4	2	60	75	Tidak Mandiri
86	FIONA SASKIA	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri
87	HAFISATUL WARDIAH	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	74	92,5	Mandiri
88	JANATUL ATMA	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	70	87,5	Mandiri
89	MARIFATIL AULIA	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	67	83,75	Mandiri
90	MINDA MARYANTI	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	69	86,25	Mandiri
91	RADA APRILIA PUTRI	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	73	91,25	Mandiri
92	RIRIN ANJANI	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	68	85	Mandiri
93	RIZA WARHAMNI	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri
94	SASKIA RAMADHANI	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	67	83,75	Mandiri

95	SINDI FEBRIANI	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	72	90	Mandiri
96	SINDI RAMA PUTRI	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	70	87,5	Mandiri
97	SYAVIRA RAMADHANI PUTRI	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	69	86,25	Mandiri
98	VICKY	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	82,5	Mandiri
99	ZIOLA SYAHJA KHAIRI	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	74	92,5	Mandiri
100	ZULFITRIANI	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	74	92,5	Mandiri

Kelayan Mandiri : 93 Orang
Kelayan Tidak Mandiri : 7 orang



7. UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN

**Rekapitulasi Skor Kemandirian
UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin**

No	Nama	Skor Indikator									Jumlah	Skor Akhir	Mandiri/
		Pengetahuan			Sikap				Keterampilan				Tdk Mandiri
		1	2	3	1	2	3	4	1	2			
1	Risman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
2	Aljoni Diza	5	5	5	5	5	4	4	4	5	42	93	Mandiri
3	Zaidir	4	3	4	4	3	3	5	5	5	36	80	Mandiri
4	Syafrial Can	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
5	Syofinal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
6	Ali Anwar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
7	Nasrul	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	60	Tidak Mandiri
8	Cingun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20	Tidak Mandiri
9	Joni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
10	Zulfikar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	40	Tidak Mandiri
11	Mawardi (agam)	4	4	3	4	4	4	5	4	4	36	80	Mandiri
12	Hariyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	60	Tidak Mandiri
13	Abdul Muis	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
14	Sukarman	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	40	Tidak Mandiri
15	Azyrul	4	4	4	5	4	4	4	3	4	36	80	Mandiri
16	Ariyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	60	Tidak Mandiri
17	Samsuar (Bari)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
18	Sofyan Noer	5	4	4	5	4	4	4	3	3	36	80	Mandiri
19	Syukur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	60	Tidak Mandiri
20	M Nasir	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
21	Syahril	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
22	Tindiak	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
23	Masdar Siregar	3	3	3	3	3	3	2	1	1	22	49	Tidak Mandiri
24	Maturidin	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10	22	Tidak Mandiri
25	Asnaf	2	2	2	3	2	3	1	1	1	17	38	Tidak Mandiri
26	Hen Junaldi (muncak)	2	1	1	2	2	1	1	1	1	12	27	Tidak Mandiri
27	Suryanto	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11	24	Tidak Mandiri

28	Hermon	5	5	4	4	4	4	4	3	3	36	80	Mandiri
29	All Bazar	3	3	3	3	2	3	3	1	1	22	49	Tidak Mandiri
30	Samsuar	2	2	2	3	2	3	2	1	1	18	40	Tidak Mandiri
31	Afrizal (Can)	3	4	3	3	4	3	4	1	1	26	58	Tidak Mandiri
32	Darsina	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
33	Syamslar	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44	98	Mandiri
34	Rita melana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	40	Tidak Mandiri
35	Enimar	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44	98	Mandiri
36	Nur Alni	4	4	5	5	5	5	5	3	3	39	87	Mandiri
37	Mahrulisa C	4	4	4	4	4	5	5	5	4	39	87	Mandiri
38	Yurmaini	4	4	5	5	4	5	4	3	3	37	82	Mandiri
39	Dewi Anggraini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	40	Tidak Mandiri
40	Sity Nursyamslah	3	3	3	3	3	3	3	2	2	25	56	Tidak Mandiri
41	Darami	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19	42	Tidak Mandiri
42	Lisma	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19	42	Tidak Mandiri
43	Asmellar	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	62	Tidak Mandiri
44	Syamsidar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
45	Erlina	5	5	5	5	5	5	4	3	3	40	89	Mandiri
46	Armaini	3	4	4	4	3	3	3	3	2	29	64	Tidak Mandiri
47	Suryati	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	40	Tidak Mandiri
48	Djasnidar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	60	Tidak Mandiri
49	Mawardi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
50	Ujang Darnis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
51	Rostian	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
52	Edy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
53	Irmansyah	4	4	4	5	4	4	5	3	3	36	80	Mandiri
54	Abdul Malik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
55	Harson	5	4	4	4	4	4	4	4	3	36	80	Mandiri
56	Syafrizal	5	4	4	4	4	5	5	5	4	40	89	Mandiri
57	Irzal	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41	91	Mandiri
58	Darmalis	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	82	Mandiri
59	Sutani Bur	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42	93	Mandiri
60	M Natsir Luth	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
61	Syamsir	5	4	5	4	4	4	5	4	4	39	87	Mandiri
62	Abdul Wahab	2	3	3	2	3	3	2	2	2	22	49	Tidak Mandiri
63	Herman	2	3	3	3	2	3	2	2	2	22	49	Tidak Mandiri
64	M Bahaudin	3	3	1	1	1	1	1	1	1	13	29	Tidak Mandiri

65	Aminudin	3	3	4	4	4	4	3	2	2	29	64	Tidak Mandiri
66	Nasrullah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
67	Syofri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
68	M. Yamin	4	4	4	3	3	3	4	2	2	29	64	Tidak Mandiri
69	Alfrial	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
70	Nk. Nur	2	3	3	3	3	3	2	2	2	23	51	Tidak Mandiri
71	Erwandi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
72	M Yusuf	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28	62	Tidak Mandiri
73	Jeludin	2	3	3	3	3	3	2	2	2	23	51	Tidak Mandiri
74	Taufik	3	4	5	4	4	5	5	3	3	36	80	Mandiri
75	Ngedjeh	1	1	1	2	2	2	1	1	1	12	27	Tidak Mandiri
76	Masyuti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20	Tidak Mandiri
77	Seriah	1	2	2	3	2	3	2	3	3	21	47	Tidak Mandiri
78	Karniati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
79	Marni	5	5	5	4	4	5	5	5	5	43	96	Mandiri
80	Mahdanier	4	5	5	5	3	4	4	3	3	36	80	Mandiri
81	Rusmiati	4	4	5	4	4	4	5	4	3	37	82	Mandiri
82	Masri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
83	Nazarudin (Ujang)	4	3	4	4	4	4	5	4	4	36	80	Mandiri
84	Antoni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	40	Tidak Mandiri
85	Tajudin	5	3	4	4	4	4	5	4	4	37	82	Mandiri
86	Nursyam	5	4	4	5	5	5	5	4	4	41	91	Mandiri
87	Syamsudin	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	82	Mandiri
88	Marwan Jamal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
89	Iriandi	5	5	5	5	5	4	5	4	5	43	96	Mandiri
90	Taharudin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
91	Rasidin	5	4	5	5	5	5	5	4	4	42	93	Mandiri
92	Muhammad Nur	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
93	Nakman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80	Mandiri
94	Harmis	5	5	5	4	5	5	4	5	4	42	93	Mandiri
95	Ramli	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44	98	Mandiri
96	Sofiatri	4	5	5	4	3	5	2	1	1	30	67	Tidak Mandiri
97	Bakri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
98	Nazar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
99	Husni	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100	Mandiri
100	Markam	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34	76	Mandiri
101	Basril	4	4	3	4	4	4	5	4	4	36	80	Mandiri

102	Hasni Ali Wargo	4	5	5	5	4	4	5	3	3	38	84	Mandiri
103	Asmayulis	4	5	5	5	5	4	5	4	4	41	91	Mandiri
104	Syafriada	5	5	5	5	5	4	5	3	3	40	89	Mandiri
105	Jaruni	5	5	5	5	5	5	5	3	3	41	91	Mandiri
106	Anizar	4	4	4	4	5	4	4	4	3	36	80	Mandiri
107	Nurjanah	5	5	4	5	5	5	4	3	3	39	87	Mandiri
108	Wami	5	4	4	5	4	5	5	3	3	38	84	Mandiri
109	Muznarwami	5	5	5	5	5	5	5	3	3	41	91	Mandiri
110	Titi Mustiati	4	5	3	5	4	4	4	4	3	36	80	Mandiri

Keterangan :

Mandiri : 73 Orang

Tidak Mandiri : 37 Orang


Jumlah kelayan : 110 Orang

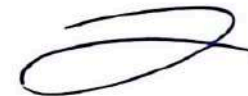
Laki - Laki : 78

Perempuan : 32

Sicincin, 20 November 2025

Mengetahui,

 Kepala UPTD PSTW Sabai Nan Aluun Sicincin



AFZAIDIR A.Ks, MM

NIP. 19680308 198901 1 001

8. UPTD PSTW KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR

INDEKS KEMANDIRIAN KELAYAN
UPTD PSTW KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR TAHUN 2025

No	Nama	Skor Indikator															Jumlah	Skor Akhir	Mandiri	
		Pengetahuan				Sikap								Keterampilan					Tidak Mandiri	
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3				
1	Mawardi	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	3	4	5	67	89,33	mandiri	
2	Jama'an	4	4	5	4	3	3	4	5	5	5	4	5	3	3	3	60	80,00	mandiri	
3	Yakub	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	64	85,33	mandiri	
4	Satio	4	4	3	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3	3	4	60	80,00	mandiri	
5	Amir Lulut	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	60	80,00	mandiri	
6	Safril	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	2	2	3	50	66,67	tidak mandiri	
7	Amril Karim	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	59	78,67	tidak mandiri	
8	Yunizar	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	4	4	60	80,00	mandiri	
9	Mayar	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	3	3	4	60	80,00	mandiri	
10	Yurna	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	60	80,00	mandiri	
11	Nurmaleli	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	65	86,67	mandiri	
12	Sumita	3	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	5	4	5	5	59	78,67	tidak mandiri	
13	Atik	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	65	86,67	mandiri	
14	Isar	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	58	77,33	tidak mandiri	
15	Mardiana	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	61	81,33	mandiri	
16	Simis	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	71	94,67	mandiri	
17	Ratmi	4	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	5	2	2	2	46	61,33	tidak mandiri	
18	Roslaini	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	70	93,33	mandiri	
19	Hafifah	4	4	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	2	3	62	82,67	mandiri	
20	Asni	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	3	3	68	90,67	mandiri	
21	Syafrida	4	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	5	2	3	3	61	81,33	mandiri	
22	Aprimal	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	5	2	2	3	62	82,67	mandiri	
23	Khailis	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	2	2	63	84,00	mandiri	
24	Manidar	4	3	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	3	2	2	60	80,00	mandiri	
25	Nursal	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	64	85,33	mandiri	
26	Asrizal	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	70	93,33	mandiri	
27	Ponimin Rasyad	4	4	5	4	5	5	3	5	5	4	4	5	5	4	5	67	89,33	mandiri	
28	Wilson	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	58	77,33	tidak mandiri	
29	Arifin	5	4	3	5	4	4	4	5	5	5	3	4	3	3	3	60	80,00	mandiri	
30	Syaiful Sy	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	72	96,00	mandiri	
31	M.Zein	4	4	3	4	3	3	4	5	5	5	3	5	3	4	5	60	80,00	mandiri	
32	Syahrial	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74	98,67	mandiri	
33	Rustam	5	3	3	2	2	2	5	5	5	5	4	5	2	2	5	55	73,33	tidak mandiri	
34	Adamris	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	2	3	4	68	90,67	mandiri	
35	Bambang Rozali	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4	5	3	2	5	60	80,00	mandiri	
36	Bahtiar	5	5	4	3	4	4	3	5	5	5	3	5	2	2	5	60	80,00	mandiri	
37	Zaherman	5	5	4	4	3	4	2	5	5	5	4	5	3	2	5	61	81,33	mandiri	
38	Anwar	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	3	3	5	66	88,00	mandiri	
39	Zainun	5	4	4	4	4	3	4	5	5	5	2	5	3	4	5	62	82,67	mandiri	
40	Saripudin	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	60	80,00	mandiri	
41	M.Kunto Nasiran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	32	42,67	tidak mandiri	
42	Rusdi	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	71	94,67	mandiri	

43	Umar	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	60	80,00	mandiri
44	Yuswardi	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	71	94,67	mandiri	
45	Afrizal	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	3	2	3	58	77,33	tidak mandiri	
46	Besrizal	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	4	70	93,33	mandiri	
47	Mula Chandra Myron	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	73	97,33	mandiri	
48	Buyung	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	4	2	35	46,67	tidak mandiri	
49	Agustar	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	62	82,67	mandiri	
50	Misdi	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	81,33	mandiri	
51	Syafrizal Sutan	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	61	81,33	mandiri	
52	Januar	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	4	2	2	2	38	50,67	tidak mandiri	
53	Mardius	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	4	2	2	2	34	45,33	tidak mandiri	
54	Abu Deman	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	4	2	2	3	43	57,33	tidak mandiri	
55	Uyun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	32	42,67	tidak mandiri	
56	Dahniar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	32	42,67	tidak mandiri	
57	Asma	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	32	42,67	tidak mandiri	
58	Martini	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	2	35	46,67	tidak mandiri	
59	Yusri	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	32	42,67	tidak mandiri	
60	Amri	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	4	63	84,00	mandiri	
61	Asril	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	32	42,67	tidak mandiri	
62	Fauzi Aziz	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	80,00	mandiri	
63	Ahmad Nur	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	60	80,00	mandiri	
64	Musianto Husen	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	85,33	mandiri	
65	Dasrial	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	60	80,00	mandiri	
66	Nainunas	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	60	80,00	mandiri	
67	Syamsuir	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	3	5	1	1	3	35	46,67	Tidak Mandiri	
68	Jasman	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	44	58,67	Tidak Mandiri	

Mandiri : 47 orang
 Tidak Mandiri : 21 orang



No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
70	083826042945	Heli indah permata sari	2	4	3	4	4	4	4	4	4
71	085668367921	Kholijah	4	3	3	4	4	3	3	3	4
72	082173155396	Mia Ramadhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3
73	081363150565	Arlinda	4	4	4	4	3	4	4	3	4
74	082361994269	Vauziah Agustin	4	4	3	3	3	3	3	3	3
75	089628527342	Yuan fatihah dzhikri	2	3	3	3	3	3	3	3	3
76	085888094373	Darathul 'Aini	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	083186226745	Siska Adelia Putri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	083181950460	Ahmad Haikal	3	3	4	3	3	4	3	4	4
79	089623198271	nadya afrilia	3	3	4	4	3	4	2	3	4
80	082282436580	Fatwa wijaya	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	081260067064	Yosi Simatupang	4	3	3	3	3	3	3	3	4
82	088270875498	Marisa Musfo Yolanda	3	3	3	3	3	3	3	3	4
83	088247774050	AL HADID GEOVANI	3	3	3	4	4	4	4	4	4
84	083869911181	Muhamad Dedek Kurniawan	3	3	3	4	3	3	3	1	3
85	083867316656	Muhammad fhadel alfahri	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	083815538065	HASANNUDIN	3	3	2	4	3	2	3	2	3
87	081275771347	Ahmad Rafli Fadhillah	3	3	3	4	4	3	3	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
106	082169544893	Busyra Aulia Luqyana	4	3	3	4	3	3	3	3	4
107	081374551430	Petrus	4	3	4	4	4	4	4	4	4
108	083125342888	Desmeria Roza	4	3	3	4	3	3	3	4	4
109	081280555418	Roza Puspita Sari	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	0811663634	ikmal	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	081363846107	Afrianto	4	4	4	4	4	4	4	2	4
112	082386835341	Wahyuni Atfatila, S. Pd	3	3	3	4	3	3	3	3	4
113	08113155185	Agus Widiyanto, S.I.Q., S.Th.I., M.Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	082213315224	Riki Rikardo	3	3	3	3	3	3	3	3	3
115	082385532200	Fadhila Aini	4	3	3	3	3	3	3	3	4
116	082284547037	Muhammad Irfan	4	4	4	4	4	4	4	2	4
117	085263814731	Rahmi, S.Pd	4	3	4	4	4	4	4	4	4
118	082288329901	Suliyanti, S.Pd	4	3	3	4	3	3	3	3	4
119	081535349791	Nenci felina	3	3	3	4	3	3	3	3	4
120	082283194391	Tria Fitri Utami	4	3	3	3	3	3	3	3	4
121	082387190221	Ari Gunawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	082285891722	Ulfa Nabila	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	081374057275	Syafi'i	3	3	3	4	3	3	3	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
142	081276357479	H.YOSERIZAL SPdI.MPd	3	3	4	4	3	4	3	2	3
143	085271666975	Yoseva Ramdanis	4	4	3	4	3	4	4	3	4
144	085271659440	Ijazul patjeri	4	3	4	4	4	4	4	4	4
145	085363225221	Septa Morita	3	3	3	3	3	3	4	3	3
146	082174419767	NURDIAH SHALAT	3	3	3	3	3	3	3	3	3
147	081378503277	Junaidi	4	3	3	3	3	4	3	3	4
148	085263990633	Elfira Deviyanti,S.Pd.	3	3	3	4	3	3	3	2	4
149	081355559334	YUSNI	4	4	3	4	3	4	4	4	4
150	088279515715	Murita Andriana. ML, S.Pd	3	3	3	4	4	4	4	4	4
151	081267014747	Dewi Afriani, SE.,M.M	3	4	4	4	4	3	4	4	4
152	082286199616	Tobi Irawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	085364066300	Jeni Srinanda	3	3	3	4	3	3	3	3	4
154	089524260816	Syahira Hayati Yusrineza	4	3	4	4	4	4	4	4	4
155	085312966787	Muziarni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	085274820506	Detty Ervita	4	4	3	4	4	4	4	4	4
157	081363213994	Siswati	3	3	3	4	3	3	3	3	3
158	082171723323	Eka Juwita Arief	3	3	3	4	3	3	3	3	4
159	081363477917	Hj. Tinny Kurniaty, S. Ag	4	4	3	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
160	082174858757	Asni Arif	3	3	3	4	3	3	3	3	4
161	085263236134	Irmawati, S.Sos	3	3	3	4	3	3	3	3	4
162	081363433239	Mayarizal	4	4	4	4	4	4	4	3	4
163	082169916687	Afriwildion	4	3	3	4	3	3	3	3	4
164	082391866492	HANIFANDI	3	4	4	4	4	3	4	4	4
165	089601658520	Nabil	4	3	4	4	4	4	4	4	4
166	088271151954	M Ghurfatta Zanurain	3	3	4	4	4	4	4	4	4
167	083140761768	Masyitoh Kartini Ramali	3	3	3	3	3	3	3	4	4
168	08992686362	Keysha Rahmadhani Syahrit	3	3	3	4	3	3	3	3	4
169	089519377030	rendy yazid alfarizi	3	4	3	4	4	4	4	4	4
170	081378745523	Nilam zulaikha	3	3	3	4	4	4	4	3	4
171	082171541054	Amirah Naila Ramadhani	4	4	4	4	3	4	3	2	4
172	083841950375	Najiha Kalista Ibadillah	3	4	3	4	4	4	4	3	4
173	087777644772	Asyifa Zilvi	3	3	3	4	3	3	3	3	3
174	085214042149	Anggi Ramadhani	4	4	4	4	4	4	4	3	4
175	082286764714	Alisa Chantika Putri	3	3	3	3	3	3	3	3	3
176	081275400956	Dhea Lova Tri jasandy	3	3	3	4	3	3	3	3	3
177	085157215772	Aqilah Nasywa Sabenna	3	3	3	4	3	3	3	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
178	081268542418	Orin Armi Vanesha	3	3	4	4	3	3	4	3	4
179	082390107408	Lailatul Fadhilah	3	3	3	4	3	3	4	3	4
180	082289207476	Nawaf	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	081375345119	Monica Efrida Mudri Wahyuni	4	3	4	4	4	3	4	4	4
182	081363139484	Dara Ayu Nusapada	3	3	3	3	3	3	3	3	3
183	081365866837	Nabila Sukma	4	3	3	4	3	3	3	3	4
184	083132240221	Nadila nahdatul huda	3	3	3	3	3	3	3	3	4
185	082174632921	Donald Debra	3	4	3	4	3	3	3	3	3
186	082391378044	Ir. FUDELIAT	3	3	3	3	3	3	3	3	4
187	085374750634	Suharmen	3	4	3	4	3	3	3	3	4
188	081277070098	Desyontori Asriel	4	3	3	4	3	3	4	3	3
189	089530119456	supendri	4	4	4	4	4	4	3	4	4
190	081363121458	Tarmizi Ahmad	4	4	3	4	3	3	4	3	4
191	085271680505	RANI FITRIA S	4	4	4	4	4	4	4	3	4
192	0895613399408	Arif anshari DWI alfi	3	3	3	4	3	3	3	3	4
193	083861978674	ENHJEL OKTADIANO SARVERA	3	4	3	4	3	4	4	4	4
194	089618176474	Ridho Illahi	3	3	3	4	3	3	3	3	4
195	085263170651	Amrizal	4	4	3	4	4	3	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
196	083867388151	Nada	3	3	3	3	3	3	3	3	3
197	082171541286	sheerin almira agusti	3	3	4	4	3	3	3	3	4
198	082171466814	Misnayetti	2	4	4	4	4	4	4	4	4
199	082287927495	Jhon simamora	3	4	3	4	3	4	4	3	4
200	081266386772	Mudar	4	3	3	4	4	3	4	3	4
201	082392049366	Ifrizal	4	3	3	4	4	3	3	3	4
202	081272478594	Syafriona	4	3	3	4	4	3	2	3	4
203	081267347737	Nur Azizah	4	4	3	4	3	3	3	3	4
204	085669063020	FAISAL HAMID	4	3	4	4	4	4	4	4	4
205	085274729732	yulia permata sari	4	4	4	4	4	4	4	3	4
206	081373995435	Bismi Rahma putri	2	4	4	4	4	4	4	4	4
207	082287860020	Aulia Rahmadani	4	4	3	4	4	4	3	3	4
Total			717	698	697	777	710	714	725	684	775
NRR			3.46	3.37	3.37	3.75	3.43	3.45	3.5	3.3	3.74
NRR Tertimbang			0.38	0.37	0.37	0.41	0.38	0.38	0.39	0.36	0.41
IKM			3.45								
Konversi IKM			86.25								
Nilai Layanan			B: Baik								

Keterangan :	
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN			
Mutu Pelayanan :			
A	(Sangat Baik)	:	88,31 - 100,00
B	(Baik)	:	76,61 - 88,30
C	(Kurang Baik)	:	65 - 76,60
D	(Tidak Baik)	:	25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.46
U2	Prosedur	3.37
U3	Waktu Pelayanan	3.37
U4	Biaya/Tarif	3.75
U5	Produk Layanan	3.43
U6	Kompetensi pelaksana	3.45
U7	Perilaku pelaksana	3.5
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.3
U9	Sarana dan Prasarana	3.74

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan	
86	Jumlah	: 207 Orang
	Jenis Kelamin	: L = 69 orang / P = 138 orang
	Pendidikan	: SD = 0 orang
		SMP = 2 orang
		SMA = 48 orang
		DIII = 56 orang
		S1 = 80 orang
		S2 = 14 orang
		S3 = 0 orang
	Periode	: 01-01-2025 s/d 30-11-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 050 /16 /SK/DINSOS-2022

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN

2021-2026

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lappran Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 16 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M.
NIP. 19750810199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Adapun pelayanan yang diberikan kepada PPKS di dalam Panti adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di dalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti <p>Di dalam Panti, PPKS mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti : perumahan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu untuk Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pengasuhan untuk anak terlantar, dan pemulasaraan. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan PPKS yang mandiri.</p> <p>Indikator kemandirian yang diukur pada PPKS di dalam Panti dispesifikasikan sebagai berikut :</p> <p>1. Pengetahuan</p> <p>A. Penyandang Disabilitas</p> <p>a. Penyandang Disabilitas Netra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca dan menulis braille 2. Memahami dasar-dasar anatomi dan patologi massage 3. Memahami Orientasi dan Mobilitas <p>b. Penyandang Disabilitas Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bisa mengenal uang dan menggunakannya dengan benar. 2. bisa mengenal angka dan huruf 3. bisa membaca dan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya <p>B. Anak Terlantar</p> <p>a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya tidak dimiliki seperti menjahit, membordir, tata boga, otomotif, las, listrik, elektronik. 2. Mengetahui peraturan tentang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja 3. Mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. <p>b. Anak Asuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pengetahuan pendidikan dasar dari SD sd SLTA <p>C. Lanjut Usia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hal-hal dasar tentang fisik, mental, spritual dan sosial 2. Mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat 	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hal-hal dasar tentang fisik, mental, spritual dan sosial 2. Mengetahui Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat di Kab/Kota 3. Mengetahui perilaku menyimpang ditengah masyarakat <p>2. Sikap</p> <p>A. Penyandang Disabilitas</p> <p>a. Penyandang Disabilitas Netra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing 2. Memiliki sikap saling menghargai dan rasa kepedulian dengan sesama <p>b. Penyandang Disabilitas Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan untuk mengucapkan terimakasih dan menyapa orang lain. 2. Bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat 3. Bisa mengikuti kegiatan ibadah 4. Timbul rasa kepedulian sesama <p>B. Anak Terlantar</p> <p>a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan 2. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Pant <p>b. Anak Asuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan 2. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Pant <p>C. Lanjut Usia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bergaul dengan teman-temannya 2. Mampu meningkatkan kepedulian antar sesama kelayan 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di dalam pant <p>D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rajin melaksanakan ibadah 2. Mampu bergaul dengan sesama 3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Pant 	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>2. Keterampilan</p> <p>A. Penyandang Disabilitas</p> <p>a. Penyandang Disabilitas Netra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai keterampilan massage/shiatsu dan kerajinan tangan 2. Mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari <p>b. Penyandang Disabilitas Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan kebersihan diri sendiri dan lingkungan 2. Menguasai keterampilan pencucian motor, membuat keset perca kaos, dan batak 3. Bisa mengurus diri sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya 4. Bisa menulis dan meniru <p>B. Anak Terlantar</p> <p>a. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yg mandiri (seperti : menjahit, membordir, tata boga, elektro, listrik, otomotif dan las) 2. Membuat rencana kegiatan untuk memulai usaha (berupa rencana anggaran biaya usaha) <p>b. Anak Asuh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguasai keterampilan tertentu yang diajarkan di dalam Panti seperti tahfiz, musik, tari, dll. <p>C. Lanjut Usia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyalurkan bakat dan kemampuan dalam pengisian waktu luang (menganyam, merajut, dan pembuatan telur asin, pertanian, beternak ikan) <p>D. Eks. Wanita Tuna Susila/ Wanita Rawan Tindak Tuna Susila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yg mandiri (seperti : tata boga, merajut, pertanian, dll) sehingga nantinya dapat disalurkan pada sektor usaha/ lapangan kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki kelayan. 	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA															
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	69,51	<p>Definisi: Hasil penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah menjalankan proses manajemen kinerja yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.</p> $IKM = \sum (Skor\ Indikator \times Bobot\ Indikator)$ <p>Interpretasi:</p> <table border="1" data-bbox="1021 555 1756 799"> <thead> <tr> <th>Skor Angka</th> <th>Kategori Huruf</th> <th>Tingkat Akuntabilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>76 - 90</td> <td>BB</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>61 - 75</td> <td>B</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>51 - 60</td> <td>CC</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Frekuensi: Setiap tahun, dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kementerian PANRB untuk instansi pusat dan daerah Tim evaluator internal atau APIP sebagai evaluasi awal 	Skor Angka	Kategori Huruf	Tingkat Akuntabilitas	91 - 100	A	Sangat Baik	76 - 90	BB	Baik	61 - 75	B	Cukup	51 - 60	CC	Kurang	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra) Dokumen Evaluasi Internal Kinerja Hasil Audit Kinerja oleh APIP Sistem Informasi SAKIP atau sistem pendukung manajemen kinerja daerah/pusat
Skor Angka	Kategori Huruf	Tingkat Akuntabilitas																		
91 - 100	A	Sangat Baik																		
76 - 90	BB	Baik																		
61 - 75	B	Cukup																		
51 - 60	CC	Kurang																		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA															
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82,50	<p>Definisi : ukuran yang menunjukkan persepsi masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun lembaga pelayanan publik</p> <p>Rumus Perhitungan:</p> $IKM = \left(\frac{\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Bobot Unsur})}{\text{Jumlah Unsur yang Terisi}} \right) \times 25$ <p>Interpretasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88.31 - 100</td> <td>A (Sangat Baik)</td> <td>Pelayanan sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>76.61 - 88.30</td> <td>B (Baik)</td> <td>Pelayanan memuaskan</td> </tr> <tr> <td>65.00 - 76.60</td> <td>C (Cukup)</td> <td>Pelayanan cukup memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 65.00</td> <td>D (Buruk)</td> <td>Pelayanan tidak memuaskan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Frekuensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal 1 kali dalam setahun (sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017) Dapat dilakukan per semester atau per triwulan, tergantung kebijakan internal dan kebutuhan evaluasi pelayanan 	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja	88.31 - 100	A (Sangat Baik)	Pelayanan sangat memuaskan	76.61 - 88.30	B (Baik)	Pelayanan memuaskan	65.00 - 76.60	C (Cukup)	Pelayanan cukup memuaskan	< 65.00	D (Buruk)	Pelayanan tidak memuaskan	<ol style="list-style-type: none"> Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kuesioner pengguna layanan, baik daring maupun luring Data feedback pelanggan, kotak saran, atau aplikasi pengaduan Dokumen pelaporan kinerja pelayanan publik
Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja																		
88.31 - 100	A (Sangat Baik)	Pelayanan sangat memuaskan																		
76.61 - 88.30	B (Baik)	Pelayanan memuaskan																		
65.00 - 76.60	C (Cukup)	Pelayanan cukup memuaskan																		
< 65.00	D (Buruk)	Pelayanan tidak memuaskan																		

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



Atry Yuswandi, S.K.M., M.K.M.
NIP. 19750811999031006